HARIAN ACEH INDONESIA

TEBAL
27 Hal
WWW.HARIANACEH.CO.ID

KAMIS, 5 NOVEMBER 2026 | HARIANACEH.co.id | WWW.HARIANACEH.CO.ID · EDISI NO. 16

ACEH

Wali Kota Sabang Dorong Perluasan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.58 WIB



SABANG – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal menjadi perhatian Pemerintah Kota Sabang.

Wali Kota Sabang mendorong penambahan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan saat menghadapi risiko kerja maupun kematian.

Hal tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di Ruang Rapat Wali Kota Sabang, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menekankan pentingnya meningkatkan jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah manfaat Jaminan Kematian (JKM), yang memberikan santunan hingga Rp42 juta bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

Zulkifli mengatakan, selama ini Pemko Sabang memberikan santunan sebesar Rp5 juta kepada keluarga warga yang meninggal dunia. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat.

“Selama ini Pemerintah Kota Sabang memberikan santunan Rp5 juta kepada warga yang meninggal dunia. Namun, melalui BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat yang terdaftar bisa mendapatkan santunan hingga Rp42 juta.

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Terima Menko Yusril, Bahas Kekhususan Aceh dan Penyelesaian Isu Bendera



BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, beserta istri dan delegasi, dalam jamuan makan malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (4/11/2026) malam.

Selengkapnya di halaman 19 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Seluruh OPD Aceh Barat Didorong Terintegrasi dalam Satu Data



MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut digelar di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Kamis (5/11/26).

Selengkapnya di halaman 20 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

DALAM EDISI INI

NASIONAL 2
ACEH 19
Aneka Berita 24

NASIONAL

Eksklusif! Mahfud MD Bicara Penyadapan Presiden Prabowo: Segera Pecat Listyo Sigit dari Polri



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak Polri memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Desakan serupa juga ditujukan kepada dua jenderal polisi lainnya yang terseret dalam perkara tersebut.

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Jokowi Tak Langsung Perlihatkan Ijazah Asli, Jawabannya Bikin Sidang Riuh



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan tidak langsung menunjukkan ijazah asli saat polemik tudingan ijazah palsu mencuat. Dia mengaku tidak yakin persoalan tersebut akan selesai jika ijazahnya diperlihatkan dalam forum biasa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Roy Suryo …

Selengkapnya di halaman 2 »

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

44 BERITA

NASIONAL

Eksklusif! Mahfud MD Bicara Penyadapan Presiden Prabowo: Segera Pecat Listyo Sigit dari Polri

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.55 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendesak Polri memberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Desakan serupa juga ditujukan kepada dua jenderal polisi lainnya yang terseret dalam perkara tersebut.

Dua jenderal lainnya yang menjadi tersangka yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Mahfud menilai ketiganya harus lebih dahulu diberhentikan dari institusi Polri sebelum menjalani proses peradilan pidana.

“Saya akan bicara yang lebih penting untuk dilakukan oleh Mabes Polri. Segera pecat Listyo Sigit tidak dengan hormat dan semua yang sudah tersangka itu karena sudah terbukti melakukan,” kata Mahfud dalam wawancara di YouTube iNews, Kamis (5/11/2026).

Mahfud menjelaskan, pemberhentian tersebut dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur sanksi administratif terhadap pejabat yang terlibat perkara pidana.

“Maksudnya begini, dipecat dulu sebelum diadili karena ada dasar hukumnya. Di dalam ketetapan MPR nomor 8 tahun 2000 tentang rekomendasi tentang arah pencegahan dan pemberantasan KKN, itu disebutkan seorang pejabat yang terlibat kasus pidana bisa dijatuhi sanksi administratif lebih dahulu sebelum tindak pidananya diselesaikan,” ujarnya.

Menurut Mahfud, proses pemberhentian secara administratif tidak harus menunggu perkara pidana selesai disidangkan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Salah satu tersangka yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Dua tersangka lainnya adalah Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu orang berinisial Irjen SU masih diperiksa sebagai saksi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain nomor telepon Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh Politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Dalam perkara ini, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Mereka juga disangkakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara serta Pasal 32 …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Aktivis NU: Polri Saja Bisa Kena Tipu Jokowi, Apalagi Kemendikbud, KPU dan Bawaslu

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.15 WIB

BANDA ACEH - Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, melontarkan pernyataan kritis terkait pengaruh dan manuver Politik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai, bukan hanya partai politik yang pernah dibesarkan Jokowi yang bisa terseret dalam persoalan politik, tetapi institusi negara sebesar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun bisa mengalami hal serupa.Pernyataan Islah tersebut menyindir dugaan kemampuan Jokowi memainkan strategi politik yang dinilainya rumit da sulit dibaca. Bahkan, menurut dia, drama dan modus politik yang digunakan Jokowi memiliki pola yang canggih.

Islah menyampaikan sindiran tersebut melalui pernyataan yang mempertanyakan bagaimana institusi sebesar kepolisian bisa ikut terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver politik Jokowi, Rabu (4/11/2026).

Menurut Islah, jika institusi sebesar Polri saja bisa terseret dalam persoalan yang dikaitkan dengan manuver Jokowi, maka persoalan yang melibatkan lembaga lain seperti Kemendikbud, KPU, dan Bawaslu juga patut menjadi perhatian publik.

Pernyataan Islah muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026) menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal polisi lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke sistem penyadapan Polri tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

Salah satu nomor yang menjadi sasaran dugaan penyadapan adalah milik Presiden Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ternyata Ini Alasan Jokowi Tak Langsung Perlihatkan Ijazah Asli, Jawabannya Bikin Sidang Riuh

Oleh Redaksi · 5 Nov, 20.05 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan tidak langsung menunjukkan ijazah asli saat polemik tudingan ijazah palsu mencuat. Dia mengaku tidak yakin persoalan tersebut akan selesai jika ijazahnya diperlihatkan dalam forum biasa.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan penasihat hukum terdakwa Roy Suryo, Abdul Gafur Sangadji, dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026).

Awalnya, Abdul Gafur mempertanyakan alasan Jokowi tidak langsung memperlihatkan ijazahnya kepada pihak yang meragukan keaslian dokumen tersebut. Menurutnya, polemik itu mungkin tidak akan berkepanjangan jika Jokowi memperlihatkan ijazah sejak awal.

"Pertanyaan saya, saudara saksi, maaf ya, tidak legowo gitu lah untuk menunjukkan saja ijazah saksi pada waktu itu, sehingga tidak perlu ada sekian kali rektor berbicara, sekian kali saudara harus mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membantah. Padahal hanya satu kali Saudara tunjukkan barangkali urusannya sudah selesai. Mengapa tidak legowo seperti itu, Saudara Saksi?," ujar Abdul Gafur bertanya ke Jokowi dalam sidang, Kamis (5/11/2026).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya telah dua kali menyampaikan imbauan melalui penasihat hukumnya sebelum melaporkan pihak-pihak yang mempersoalkan ijazahnya.

Dia juga menyebut telah membuka kesempatan penyelesaian melalui kesepakatan perdamaian yang melibatkan Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar.

"Yang pertama, saya telah melakukan imbauan dua kali sebelum saya melaporkan. Dua kali saya menyampaikan imbauan lewat penasihat hukum saya, Hasibuan dan Hasibuan, dua kali. Kemudian juga saya memberikan kesempatan untuk kesepakatan perdamaian, yang itu telah dilakukan oleh Bapak Profesor Eggi Sudjana, Pak Damai Hari Lubis, dan Pak Rismon Sianipar. Kami sudah membuka pintu untuk itu," ucap Jokowi.

Namun, Abdul Gafur kembali mendalami alasan Jokowi memilih menawarkan penyelesaian melalui restorative justice dan meminta pihak yang menuding untuk meminta maaf, ketimbang langsung menunjukkan ijazah aslinya.

Setelah sempat terpotong intervensi hakim, Jokowi akhirnya memberikan jawaban yang menjadi perhatian pengunjung sidang.

"Karena saya tidak yakin kalau saya menunjukkan di dalam forum biasa ijazah saya itu kemudian persoalan selesai, kayak saya nggak yakin. Sehingga saya ingin persoalan ini diselesaikan lewat yang ruang

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan dan riuh pengunjung persidangan. Suasana ruang sidang pun sempat ramai setelah jawaban Jokowi disampaikan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Puluhan Ribu Prajurit Dikerahkan ke Jakarta, Ini Penjelasan TNI

Oleh Redaksi · 4 Nov, 21.57 WIB

BANDA ACEH - Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Tunggul membenarkan adanya pengerahan pasukan militer dalam jumlah besar ke Jakarta.Hal ini disampaikan merespons kabar yang menyebut TNI AL akan menerjunkan lebih dari 20 ribu prajurit dalam waktu dekat.

“Kami sampaikan bahwa informasi tentang pengerahan personel TNI AL tersebut adalah benar,” kata Tunggul dalam keterangan resmi yang diterima Inilah.com, Rabu (4/11/2026).

Tunggul menjelaskan penurunan ribuan prajurit merupakan bagian dari tugas negara. Di mana, mereka diamanatkan menjaga stabilitas dan keamanan negara.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Infonya, Lebih dari 6.000 Nomor Telepon Disadap, Tak Ada Satupun Keluarga Jokowi & Kroninya

Oleh Redaksi · 5 Nov, 18.31 WIB



BANDA ACEH - Politisi dan jurnalis senior Akbar Faizal mengungkap bahwa lebih dari 6.000 nomor telepon masuk dalam daftar sasaran dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo. Dari ribuan nama tersebut, menurutnya, tidak ada satu pun yang berasal dari keluarga atau orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).Akbar Faizal sendiri menyebut namanya masuk dalam daftar sadap itu. Selain dirinya, sejumlah tokoh publik lain juga disebut tercantum, di antaranya akademisi hukum tata negara Feri Amsari dan akademisi hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Mochtar. Bahkan, pejabat internal Polri, yaitu Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti yang menjabat Kabakintelkam Polri, juga disebut ada dalam daftar.

"Sampai pejabat kepolisian juga kena sadap, kurang ajar sekali," ujar Akbar Faizal, Kamis (5/11/2026). Ia menjelaskan daftar tersebut sudah disusun dalam dokumen tebal yang memuat nama, nomor telepon, serta jabatan atau profesi masing-masing target.

Tidak Ada Keluarga atau Kroni Jokowi

Yang paling disorot Akbar Faizal adalah absennya nama-nama yang terafiliasi dengan lingkungan terdekat Jokowi. "Tak satupun keluarga Jokowi dan kroni-kroninya yang masuk daftar ini," katanya sambil menceritakan pengamatannya terhadap dokumen daftar sadap. Tidak ditemukan pula nomor telepon Pratikno maupun anggota keluarga Jokowi. Tidak ada nama yang dikenal sebagai bagian dari "Kelompok Solo" dalam daftar yang sedang ditelusuri.

Konteks Kasus Penyadapan Ilegal

Pernyataan Akbar Faizal muncul di tengah proses hukum kasus dugaan penyadapan ilegal. Bareskrim Polri telah menetapkan Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama dua perwira tinggi lainnya—Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (ASN) dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH)—sebagai tersangka. Mereka diduga memerintahkan pemasukan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, tanpa surat permohonan penyidik, dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum sepanjang periode 2025 hingga 2026.

Sasaran yang disebutkan penyidik mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh Politik, media, organisasi masyarakat, LSM, hingga kalangan pengusaha. Para tersangka juga diduga memerintahkan penghapusan file dan log hasil sadapan pada sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Kasus berawal dari laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Mabes Polri dan dijerat pasal berlapis terkait penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Keras! Mahfud MD Sebut Ada Bangkai di Mabes Polri jika Listyo Sigit Tak Dipecat

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.59 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD melontarkan kritik keras usai mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Mahfud menilai, Polri harus segera memberhentikan Listyo secara tidak hormat karena statusnya sebagai penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Mahfud bahkan menyebut keberadaan Listyo di tubuh Polri tanpa pemberhentian dapat menjadi aib bagi institusi tersebut.

"Terutama kalau kayak Listyo ini karena dia menyandang Bintang Maha Putera, pejabat negara. Berarti di Mabes Polri itu ada lambang bangkai di situ kalau dia tidak segera dipecat," kata Mahfud dalam wawancara eksklusif di YouTube iNews, Kamis (5/11/2026).

Mahfud kemudian menyoroti tanda kehormatan Bintang Mahaputera yang diterima Listyo Sigit. Dia mempertanyakan bagaimana penghargaan negara tersebut masih melekat pada seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran hukum.

"Masa Bintang Mahaputera melekat pada orang yang sudah jelas melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.

Diketahui, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima tanda kehormatan Bintang Mahaputera atas jasa-jasanya yang dinilai luar biasa di bidang kepolisian maupun bidang lain yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara.

Tanda kehormatan tersebut juga diberikan atas darma bakti dan jasa yang diakui secara luas di tingkat nasional maupun internasional.

Di sisi lain, Listyo Sigit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access).

Selain Listyo Sigit, dua tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso. Sementara itu, satu orang berinisial Irjen SU masih diperiksa sebagai saksi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, dugaan tindak pidana tersebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi

NASIONAL

Mensesneg: Dugaan penyadapan Kepala Negara mengarah ke makar

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.44 WIB

BANDA ACEH - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berpendapat dugaan kasus penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar."Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan tindakan tersebut juga mengarah pada perbuatan yang membahayakan kepentingan negara, termasuk keselamatan pimpinan negara.

Dia menilai tindakan penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, dan akses ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat negara merupakan tindakan serius, terlebih karena hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Kalau melakukan tindak penyadapan, penghilangan barang bukti elektronik, ilegal akses untuk sesuatu yang sebenarnya sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan kita dan ini menyangkut Kepala Negara, menyangkut pejabat-pejabat negara, nah ini kan sesuatu yang luar biasa," kata dia.

Prasetyo menyebut pemerintah belum mengetahui secara terperinci motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung di kepolisian.

"Jadi kita tidak mengerti juga apa yang menjadi motif dan tujuannya," ujarnya.

Dia mengatakan dugaan penyadapan terhadap pimpinan negara perlu menjadi perhatian karena terdapat informasi sensitif yang dapat membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara.

"Kalau sudah berbicara Kepala Negara, berbicara pimpinan negara, di situ kan banyak informasi yang tentu sangat sensitif, yang itu akan membahayakan, bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," katanya.

Terkait penanganan perkara tersebut, Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto agar proses hukum dilakukan secara objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Presiden juga meminta agar penanganan kasus tersebut dilakukan sebaik-baiknya tanpa ada informasi yang ditutup-tutupi.

"Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seobjektif mungkin tanpa ada yang ditutup-tutupi," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

Diduga Dalang Penyadapan Prabowo, Aktivis 98: Tangkap dan Penjarakan Jokowi!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.13 WIB

BANDA ACEH - Aktivis 98 Jayadi Santoso mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia bahkan meminta aparat tidak berhenti pada pemeriksaan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memberikan perintah.Menurut Jayadi, dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara dan kewibawaan pemerintahan. Karena itu, penyelidikan harus diarahkan untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik dugaan tindakan tersebut.

"Jokowi harus diperiksa. Kalau memang ditemukan bukti keterlibatan dan perannya sebagai pihak yang memerintahkan, tangkap dan penjarakan. Jangan hanya berhenti pada orang-orang yang diduga menjalankan operasi di lapangan," tegas Jayadi, Rabu (4/11/2026).

Ia mempertanyakan kemungkinan mantan Kapolri Listyo Sigit melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo tanpa adanya perintah atau kepentingan dari pihak lain. Namun, Jayadi menilai dugaan tersebut harus dibuktikan melalui penyelidikan yang transparan, bukan hanya dibangun berdasarkan asumsi Politik.

Jayadi juga menyoroti hubungan panjang Listyo Sigit dengan Jokowi. Menurut dia, kedekatan keduanya telah terjalin sejak Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo. Hubungan tersebut kemudian berlanjut ketika Jokowi menjadi Presiden RI dan Listyo Sigit dipercaya menduduki jabatan Kapolri.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Sakit Stroke, Alasan Polisi Tidak Tahan Slamet Uliandi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 22.04 WIB



BANDA ACEH - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap purnawirawan Polri Slamet Uliandi (SU), meski telah ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Keputusan tersebut diambil pihak kepolisian berdasarkan pertimbangan terkait kondisi kesehatan tersangka yang memburuk pasca-mengalami serangan stroke.

"Tersangka SU saat ini belum dilakukan penahanan oleh penyidik karena pertimbangan kondisi kesehatan yang bersangkutan yang sedang mengalami sakit pasca-stroke dan memerlukan perawatan medis secara intensif," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Suhermanto, dalam Konferensi Pers di Jakarta, Kamis (5/11).

Kondisi penanganan SU ini berbeda dengan tiga tersangka lain dalam skandal yang sama, yakni EH, AS, dan satu perwira lainnya, yang saat ini seluruhnya telah mendekam di rumah tahanan Mako Brimob.

Meski tidak ditahan, Bareskrim Polri memastikan proses hukum terhadap mantan Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Bareskrim Polri periode 2010–2019 tersebut tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"Meskipun dilakukan penangguhan penahanan karena alasan medis, kami tegaskan proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap saudara SU tetap berjalan secara transparan, profesional, dan objektif," ujar dia

Dalam konstruksi perkara, SU yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dinilai memiliki peran krusial sebagai pihak yang memberikan izin dan persetujuan operasional penyadapan.

"Setiap tindakan provisioning atau pengoperasian sistem penyadapan yang dilakukan oleh tersangka lain harus mendapatkan izin dan persetujuan dari tersangka SU. Selain itu, yang bersangkutan juga menyetujui permohonan penghapusan file rekam data hasil penyadapan pada awal Oktober 2026," katanya.

Atas perbuatannya, SU disangkakan Pasal 33 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU ITE tentang illegal access, Pasal 258 ayat (1) KUHP Baru, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE terkait penghapusan dokumen elektronik.

NASIONAL

Kubu Roy Suryo Tuding Jokowi Langgar Tata Cara Sidang: Tunjukkan Ijazah Tak Seizin Hakim

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.26 WIB



BANDA ACEH - Kuasa hukum terdakwa Roy Suryo, Refly Harun, menyoroti sejumlah kejanggalan saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah dalam persidangan perkara dugaan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Salah satunya, penunjukan ijazah kepada publik disebut belum mendapat persetujuan majelis hakim.

"Ketika Jokowi menunjukkan ijazahnya secara show of force membalik ke massa, sebenarnya tidak diizinkan oleh hakim. Jadi tidak ada izin hakim. Jadi dia sebenarnya melanggar tata cara persidangan. Apalagi dilakukannya dua kali. Dengan mengambil itu lalu kemudian dia balik. Itu satu. Tidak ada izin," kata Refly saat jeda sidang.

Refly juga mempertanyakan tindakan Jokowi yang menunjukkan ijazah tersebut kepada publik dalam persidangan. Menurutnya, dokumen itu telah disita oleh jaksa penuntut umum (JPU) sehingga semestinya ditampilkan oleh pihak kejaksaan.

"Kedua, ijazah itu kan disita oleh penuntut umum. Masa yang nunjukin Jokowi? Aneh. Ya kan? Seharusnya yang menunjukkan penuntut umum karena ijazah itu sudah disita. Itu yang kedua," katanya.

Selain itu, Refly mengaku melihat perbedaan antara ijazah yang ditampilkan Jokowi di persidangan dan dokumen yang diperlihatkan saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya.

"Perasaan saya, ini baru perasaan ya karena kita harus ada pembuktian. Mata saya melihat bahwa ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi hari ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan dalam gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025. Berbeda. Jadi kalau misalnya berbeda, maka tentu di sini pasti ada kepalsuannya. Ada rekayasa dan lain sebagainya," ujar Refly.

Refly juga mempertanyakan jawaban Jokowi selama persidangan. Dia menyinggung catatan yang dibawa Jokowi dan mempertanyakan apakah pertanyaan jaksa penuntut umum beserta jawabannya telah disiapkan sebelumnya.

"Apakah sudah di-set pertanyaan penuntut umum dan pertanyaan dan jawaban? Kita tidak tahu. Yang jelas Pak Jokowi buka catatan. Tapi catatan apa itu nanti kita coba kita tanyakan. Itu saja," pungkasnya.

Diketahui, Jokowi menunjukkan sejumlah dokumen pendidikan, termasuk ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Ijazah itu ditampilkan di hadapan majelis hakim hingga Roy Suryo selaku terdakwa.

Berdasarkan pantauan, Jokowi tampak memperlihatkan satu per satu ijazah yang dibawa ke persidangan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi-Gibran Disebut Jadi Dalang di Balik Dugaan Makar Penyadapan Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.44 WIB

BANDA ACEH - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai pernyataan Istana mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dapat mengubah peta Politik nasional. Ia bahkan menyinggung kemungkinan keterlibatan Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.Komentar tersebut muncul setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tindakan penyadapan yang diduga melibatkan Listyo Sigit Prabowo berpotensi mengarah pada perbuatan makar.

Melalui akun X pribadinya, Rabu (4/11/2026), Jhon menilai pernyataan Istana membuat ruang pembelaan bagi kelompok tertentu semakin sempit.

"Istana menyatakan tindakan Listyo Sigit Prabowo menyadap Presiden Prabowo Subianto dikategorikan dalam perbuatan MAKAR," ucap Jhon dilansir dari X pribadinya, Rabu (4/11/2026).

Ia kemudian melontarkan dugaan mengenai kemungkinan adanya perintah dari pihak lain di balik kasus tersebut. Jhon secara khusus menyebut nama Jokowi dan Gibran.

"Selesai sudah ruang gerak geng Solo untuk membela diri. Akan sangat berbahaya jika dugaan makar ini ada komando dari Jokowi atau Wapres Gibran," ucapnya.

Jhon juga mengaitkan perkara tersebut dengan peluang pemakzulan Gibran. Menurutnya, apabila dugaan keterlibatan itu terbukti, persoalan tersebut dapat menjadi dasar politik dan hukum untuk mendorong proses pemakzulan.

"Jika demikian, jalan untuk MEMAKZULKAN Gibran terbuka lebar dengan alasan TINDAK PIDANA BERAT dan perbuatan tercela," ungkapnya.

Ia turut menilai posisi Listyo Sigit semakin sulit setelah kasus tersebut dikaitkan dengan dugaan makar.

"Listyo benar-benar tidak akan diampuni kali ini, karena MAKAR adalah perbuatan tindak pidana berat dan hukumannya bisa hukuman MATI," pungkasnya.

Sebelumnya, Prasetyo Hadi menyatakan dugaan penyadapan terhadap Prabowo tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa karena berpotensi membahayakan kepentingan negara dan keselamatan kepala negara.

"Ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Meski demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui secara terperinci motif di balik dugaan penyadapan yang disebut melibatkan Listyo dan dua perwira tinggi lainnya, termasuk siapa pihak yang menerima hasil penyadapan.

"Secara detail belum, ya, karena itu kan masih proses yang sekarang sedang dilakukan oleh teman-teman di Kepolisian.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Bungkam Soal Aliran Uang ke Muktamar NU, Nusron Wahid Malah Bahas Izin ke LN

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.05 WIB



BANDA ACEH - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak menjawab pertanyaan wartawan mengenai dugaan aliran uang ke Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) setelah menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nusron justru merespons mengenai polemik perjalanan dinas ke luar negeri. Ia menegaskan, setiap perjalanan dinas yang dilakukan seorang menteri, baik ke luar kota maupun ke luar negeri, dipastikan memiliki surat izin perjalanan dari Kementerian Sekretariat Negara.

"Saya pejabat publik seorang menteri, kalau dinas ke luar kota apa lagi keluar negeri, dipastikan ada surat ijin perjalan dari kementerian sekretariat negara jadi …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dewan Jenderal Polisi Goyang Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 17.37 WIB

Kasus dugaan penyadapan ilegal di tubuh Polri bukan sekadar skandal sejumlah jenderal. Adakah "Dewan Jenderal Polisi", jaringan kekuasaan informal yang mampu mengendalikan sumber daya kepolisian dan memengaruhi Politik nasional? Jika hipotesis ini terbukti, siapa sebenarnya yang mengendalikan Polri: Kapolri, Presiden, atau kekuatan lain di balik institusi?

Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri bukan sekadar persoalan penyalahgunaan kewenangan. Perkara ini membuka pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah Polri masih sepenuhnya berada di bawah kendali rantai komando formal, atau ada jaringan kekuasaan informal yang mampu menggunakan sumber daya dan instrumen kepolisian untuk kepentingan di luar tugas institusi?

Pertanyaan itu semakin penting ketika sejumlah jenderal polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, aktivis, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

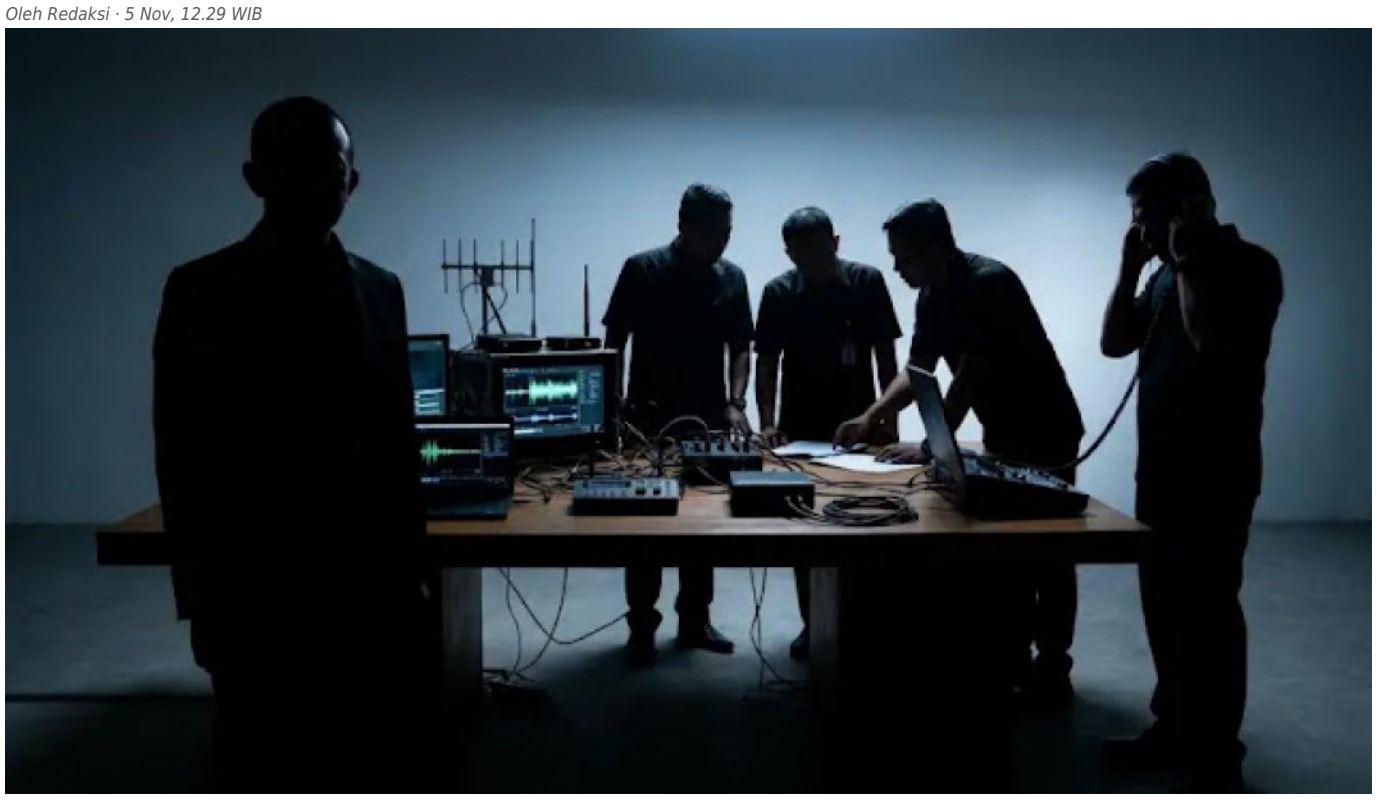
» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Wartawan Senior Bongkar Dugaan Ketum Partai Terlibat Penyadapan Presiden, Dikenal Dekat dengan Solo

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.29 WIB



BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Kali ini, wartawan senior Setiyardi Budiono mengungkap informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang ketua umum partai Politik dalam rangkaian peristiwa penyadapan tersebut.Setiyardi mengaku memperoleh informasi dari sejumlah narasumber yang disebutnya kredibel. Informasi itu berkaitan dengan pertemuan antara seorang ketua umum partai politik dan sejumlah jenderal yang belakangan dikabarkan ditangkap dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo.

Menurut Setiyardi, pertemuan tersebut berlangsung di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, sekitar tiga jam sebelum penangkapan para jenderal yang dimaksud.

"Kawan-kawan, ini ada perkembangan baru dalam soal konspirasi penyadapan Presiden Prabowo. Saya mendapatkan informasi valid dari beberapa narasumber bahwa ada seorang ketua umum partai terlibat dalam kasus penyadapan kepada Presiden Prabowo," ungkap Setiyardi di channel YouTube Obor Rakyat Reborn, Kamis (5/11/2026).

Ia menyebut, dalam pertemuan tersebut terdapat belasan jenderal yang melakukan rapat koordinasi bersama ketua umum partai politik tersebut.

Setiyardi bahkan mengklaim bahwa pertemuan semacam itu bukan baru sekali dilakukan. Menurut informasi yang diterimanya, rapat koordinasi tersebut disebut kerap berlangsung dan sang ketua umum partai beberapa kali hadir.

"Fakta yang diterima pada malam penangkapan para jenderal yang melakukan penyadapan, beberapa saat sebelumnya, sekitar tiga jam sebelumnya, sang ketua umum partai ini melakukan rapat koordinasi dengan para jenderal yang akhirnya ditangkap," katanya.

Ia juga menyebut bahwa penyidik Mabes Polri telah mengetahui keberadaan dan aktivitas pertemuan tersebut.

Meski mengaku mengetahui identitas ketua umum partai yang dimaksud, Setiyardi memilih tidak mengungkap namanya secara terbuka.

Ia beralasan tidak ingin mengganggu proses penyidikan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Polri maupun pemerintah untuk menyampaikan perkembangan perkara tersebut kepada publik.

Namun, Setiyardi memberikan sejumlah petunjuk yang menurutnya dapat mengarahkan publik untuk menduga siapa sosok ketua umum partai politik tersebut.

"Pertama, ketua umum partai ini dikenal sangat dekat dengan Solo. Sangat dekat, agak norak. Yang kedua, ketua umum partai ini hidupnya penuh dengan kontroversi," ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung memunculkan perhatian karena menyangkut dugaan keterlibatan elite politik dalam persoalan keamanan Presiden.

Apabila informasi mengenai pertemuan tersebut benar, penyidik perlu menelusuri lebih jauh siapa saja yang hadir, apa agenda pembicaraan, serta apakah terdapat hubungan antara pertemuan itu dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Kapolri Makin Ngendus Pergerakan LSP Saat Kerahkan Demo Buruh Agar Menampilkan Gibran jadi Pahlawan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.32 WIB

BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti pasal-pasal yang dikaitkan dengan kasus dugaan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Mahfud turut mempertanyakan kemungkinan adanya unsur makar di balik perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Mahfud menyebut sejumlah ketentuan hukum yang menurutnya berkaitan dengan perkara tersebut, antara lain Pasal 208 dan Pasal 332 KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurutnya, unsur makar belum terlihat dari pasal-pasal yang disebutkan dan perkara tersebut masih berada pada tahap awal. Meski demikian, ia menilai tujuan di balik dugaan penyadapan perlu ditelusuri lebih jauh.

"Tujuannya memang agak-agak makar," ujar Mahfud.

Mahfud kemudian mengaitkan kasus tersebut dengan sejumlah dinamika politik yang sebelumnya menjadi perhatian publik.

Ia menyinggung pernyataan akademisi Connie Rahakundini Bakrie pada 2024 yang pernah menyampaikan klaim bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan jatah masa jabatan dua tahun kepada Prabowo Subianto.

"Sehabis itu, muncul rentetan kejadian lain," tambahnya.

Mahfud juga menghubungkan polemik ijazah Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan dugaan adanya pematangan rencana politik tertentu.

Selain itu, ia menyinggung pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang pernah menyampaikan bahwa masa pemerintahan Prabowo tidak akan berlangsung hingga 2029.

Menurut Mahfud, rangkaian peristiwa tersebut perlu dicermati dalam melihat perkembangan situasi politik nasional.

Mahfud turut menyoroti rencana demonstrasi besar-besaran buruh di Istana pada 20 Oktober 2026 lalu.

Ia menyebut adanya informasi mengenai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani aksi tersebut.

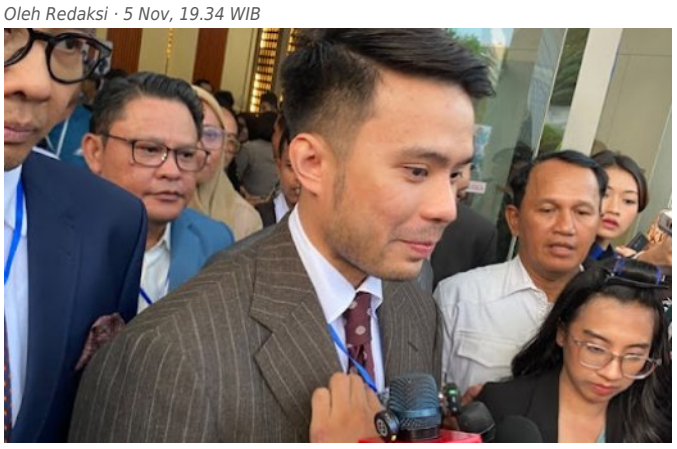
Mahfud mempertanyakan tujuan di balik skenario penanganan demonstrasi yang menurutnya perlu ditelusuri.

"Sekarang sudah ada pematangan lah, persis 20 Oktober rencana demo buruh besar-besaran di Istana, dan Kapolri Suyudi Ario Seto tahu, demo buruh nanti yang ngatasi Gibran Rakabuming Raka, jadi seolah-olah yang ngatasi Gibran. Buruh akan pulang atas perintah Gibran, akhirnya dilacak ini tujuannya apa?" ungkapnya.

NASIONAL

Kuasa Hukum Jokowi Puas Bisa Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 di Persidangan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.34 WIB



BANDA ACEH -Kuasa hukum Joko Widodo, Yakup Hasibuan, mengaku puas dengan kesaksian mantan Presiden tersebut dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

Yakup mengatakan, Jokowi telah memperlihatkan dokumen ijazah mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi dalam persidangan tersebut.

"Kami sangat puas dengan hasilnya, karena akhirnya Pak Jokowi bisa menunjukkan seluruh ijazahnya dari SD sampai S1, semua diperlihatkan," kata Yakup.

Menurut dia, Jokowi juga memberikan penjelasan terperinci mengenai perjalanan akademiknya selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Penjelasan itu, lanjut Yakup, mencakup proses pendaftaran kuliah, dokumen kelulusan, hingga hal-hal teknis terkait penyusunan skripsi.

"Pak Jokowi sangat jelas, sangat detail, sangat lengkap menjelaskan dari perkuliahannya, dari pendaftaran, hingga dokumen-dokumen pendukung untuk kelulusan," ujarnya.

Yakup menyebut Jokowi bahkan mampu menjawab pertanyaan mengenai tempat pencetakan skripsi, mesin yang digunakan, hingga dokumen administrasi perpustakaan.

Ia menilai kemampuan Jokowi menjelaskan sejumlah detail tersebut menjadi bagian penting dari pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Yakup juga menanggapi pertanyaan dari pihak terdakwa yang menurut penilaiannya tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara.

Meski demikian, ia mengatakan Jokowi tetap menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan jelas.

"Kami sangat puas di hari ini. Pak Jokowi bisa mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan ijazahnya di forum yang paling terhormat ini, di depan Yang Mulia Majelis Hakim," tuturnya.

Terkait polemik tanda tangan guru besar UGM, Prof. Sumitro, Yakup mengatakan pihak kampus nantinya akan memberikan penjelasan mengenai surat keputusan pengangkatan yang disebut telah terbit pada 1985.

Ia juga menyebut Jokowi telah menjelaskan bahwa Prof. Sumitro langsung menandatangani dokumen ketika dimintai tanda tangan.

NASIONAL

Pengaruh Geng Solo Mulai Diputus Usai Penangkapan Listyo Sigit Dkk

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.02 WIB

BANDA ACEH -Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri memunculkan spekulasi mengenai pertarungan Politik di lingkaran kekuasaan.

Direktur Riset IndoStrategi Research Intelligence, Ali Noer Zaman, menilai kasus tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika persaingan antara kelompok yang dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau kerap disebut Geng Solo dengan kelompok Presiden Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Geng Hambalang.

"Berita ini mengagetkan kita semua dan mengingatkan kita tentang pertarungan politik yang tengah terjadi antara dua kubu, yakni kubu Jokowi, yang sering disebut sebagai geng Solo, dengan kubu Prabowo (Geng Hambalang).

Secara politik, peristiwa tersebut bisa dipandang sebagai rentetan peristiwa yang berupaya memutus pengaruh geng Solo dalam kekuasaan politik Presiden Prabowo Subianto," kata Ali kepada wartawan, Rabu, 4 November 2026.

Menurut Ali, dinamika tersebut juga terlihat dari pergantian sejumlah pejabat yang dinilai memiliki kedekatan dengan Jokowi.

Ia memperkirakan kelompok yang terdampak perubahan konfigurasi kekuasaan tersebut tidak akan tinggal diam menghadapi perkembangan politik yang terjadi.

"Secara normatif kubu Jokowi kemungkinan tidak akan tinggal diam dan sangat mungkin melakukan perlawanan," ungkapnya.

Kendati begitu, Ali berharap persaingan politik di lingkaran elite tidak sampai mengganggu stabilitas nasional maupun kehidupan masyarakat.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Selamat Ginting: Pengerahan Pasukan TNI di Jakarta sampai Gibran Lengser

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.18 WIB



BANDA ACEH - Penebalan pasukan TNI di Jakarta pada malam penangkapan sejumlah jenderal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, memunculkan tanda tanya besar. Mengapa kekuatan militer dalam jumlah besar dikerahkan untuk mengamankan ibu kota? Ancaman apa yang sebenarnya sedang dihadapi negara?Pengamat Politik dari militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, mengungkapkan adanya perubahan mencolok dalam kesiapan pasukan TNI. Menurut dia, prajurit yang dikerahkan tidak lagi menggunakan pakaian dinas harian, melainkan pakaian dinas lapangan (PDL).

Perubahan tersebut, menurut Selamat, menunjukkan bahwa pasukan berada dalam kondisi kesiapan menghadapi kemungkinan situasi yang lebih serius.

“Enggak ada lagi hari ini atau dari malam itu tentara yang menggunakan pakaian dinas harian. Enggak ada. Sekarang sudah menggunakan pakaian dinas lapangan. Mereka siap tempur menghadapi situasi seperti itu,” kata Selamat Ginting di Podcast Forum Keadilan Madilog, Kamis (5/11/2026).

Bahkan, Selamat memperkirakan sekitar 100.000 personel TNI akan dikerahkan untuk menjaga keamanan ibu kota negara.

“Saya perkirakan sekitar 100.000 personel TNI akan menjaga ibu kota negara ini,” ujarnya.

Pernyataan tersebut mengundang pertanyaan mengenai tingkat ancaman keamanan yang menjadi pertimbangan di balik penebalan kekuatan militer tersebut.

Menurut Selamat, situasi Politik dan keamanan tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya ancaman terhadap Presiden Prabowo Subianto maupun Jenderal Suyudi.

Dia menyinggung kemungkinan terjadinya serangan balik terhadap Suyudi dan menilai posisi jenderal tersebut berpotensi mendapatkan ancaman serius.

“Kalau terjadi serangan balik terhadap Jenderal Suyudi, sebesar apa kira-kira ancaman yang akan didapatkan? Posisi Suyudi akan di-backup oleh teknik. Artinya bukan hanya Prabowo yang diincar, tapi juga Suyudinya,” ungkapnya.

Selamat juga mengaitkan situasi tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Menurut dia, tidak masuk akal apabila persoalan penyadapan hanya melibatkan pihak eksternal tanpa kemungkinan adanya persoalan di lingkungan internal kekuasaan.

“Bagi saya tidak masuk akal juga ada sebuah penyadapan itu hanya pihak eksternal. Oleh karena itu, menurut saya juga istana harus bersih-bersih diri dari ring satunya,” tegas Selamat.

Dia mempertanyakan siapa yang mengelola telepon seluler Presiden, jaringan penyedia layanan komunikasi yang digunakan, serta bagaimana sistem keamanan komunikasi kepala negara selama ini dijalankan.

“Kira-kira siapa yang memegang handphone-nya Presiden? Provider mana? Apakah yang disadap dari email-nya, dari suara, gelombang, atau lain-lain,” katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Yusril: Kasus penyadapan terhadap Presiden mengarah pada tindakan makar!

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.20 WIB

BANDA ACEH – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara mulai menunjukkan indikasi tindak pidana makar. Namun, indikasi tersebut masih merupakan kesimpulan sementara dan belum menjadi hasil akhir penyidikan.Yusril mengatakan, pengembangan penyidikan kasus yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri itu menemukan dugaan motif yang lebih luas dari sekadar penyadapan. Aparat penegak hukum kini mendalami tujuan serta kepentingan di balik tindakan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Yusril menjelaskan, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan dan intersepsi elektronik. Salah satunya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sementara itu, satu orang lainnya masih dalam proses penyelidikan.

Menurut Yusril, pada tahap awal penyidikan, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penyadapan serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai intersepsi elektronik.

Namun, seiring pengembangan perkara, penyidik mulai mendalami motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, muncul indikasi yang mengarah pada kemungkinan tindak pidana makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP.

Yusril menegaskan, indikasi tersebut belum menjadi kesimpulan final karena proses pendalaman masih berlangsung. “Kesimpulan sementara, belum kesimpulan final, bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah ke tindakan makar,” ungkap Yusril.

Ia menjelaskan, penetapan tersangka pada tahap awal dilakukan berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik.

Meski demikian, pengembangan penyidikan tidak hanya berfokus pada perbuatan penyadapan. Penyidik juga menelusuri motif, tujuan, serta kepentingan yang ingin dicapai melalui penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara.

Yusril mengatakan, dari pengembangan perkara mulai ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan makar, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHP.

“Ketika mulai dikembangkan akan ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Heran Dituding Punya Ijazah Palsu: Aslinya Saja Belum Dilihat

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.35 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mempertanyakan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Menurut dia, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena dilontarkan oleh pihak yang bahkan belum pernah melihat ijazah aslinya.

"Belum lihat ijazah asli kok bilang ijazah palsu, logika berpikirnya seperti apa," kata Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis 5 November 2026.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi akhirnya memperlihatkan ijazah asli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia juga menunjukkan dokumen pendidikan lainnya, mulai dari ijazah SD, SMP, hingga SMA.

Selain memperlihatkan ijazah, Jokowi menjelaskan proses penyusunan skripsinya ketika menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Dia mengaku harus mengajukan proposal judul hingga tiga kali sebelum mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro.

"Yang Mulia, dalam hal skripsi saya ingin menyampaikan bahwa skripsi ini kami buat dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya yaitu Prof Dr Ir Achmad Soemitro," ujarnya.

Jokowi juga menyinggung sejumlah dokumen yang beredar dan disebut sebagai halaman pengesahan skripsinya. Dia menegaskan, dokumen tersebut tidak sesuai dengan skripsi miliknya karena tidak mencantumkan identitas skripsi Jokowi dan justru menampilkan wajah orang lain.

Dia turut meluruskan penggunaan istilah dalam dokumen tersebut. Menurut Jokowi, karya ilmiah yang disusunnya merupakan skripsi, bukan tesis sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dipersoalkan.

"Tulisan di saya juga skripsi, tidak ada tulisan tesis," tegasnya.

Jokowi juga menjelaskan bahwa pada 1985, ribuan skripsi dicetak menggunakan jenis huruf Times New Roman.

Persidangan ini berkaitan dengan perkara yang menjerat Roy Suryo sebagai terdakwa. Dia didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi elektronik menyangkut tudingan ijazah palsu Jokowi.

Jaksa juga mendakwa Roy melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

Atas perbuatan tersebut, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara personal.

Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

NASIONAL

Prabowo Tunjuk Letjen Aryo Windutomo Jadi Plt KSP Gantikan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.25 WIB

BANDA ACEH - Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Keputusan tersebut telah ditandatangani melalui Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu (4/11/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, keputusan pemberhentian tersebut diambil langsung oleh Presiden pada Rabu pagi.

Untuk sementara, posisi Kepala Staf Kepresidenan akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt).

"Pada pagi hari ini tadi Bapak Presiden telah mengambil keputusan dan telah menandatangani Keputusan Presiden berkenaan dengan pemberhentian Saudara Listyo Sigit Prabowo dalam kapasitas beliau sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Letnan Jenderal TNI Aryo Windutomo untuk menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Kesekretariatan Kepresidenan.

Penunjukan tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah keputusan pemberhentian Listyo Sigit Prabowo ditetapkan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Listyo Sigit Disebut Bentuk Ormas Beranggotakan Para Mantan Napi Teroris, Untuk Apa?

Oleh Redaksi · 5 Nov, 11.17 WIB



BANDA ACEH – Mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Listyo Sigit Prabowo disebut terlibat dalam pembentukan atau penguatan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang anggotanya terdiri dari mantan narapidana terorisme (napiter) dan simpatisan jaringan Jamaah Islamiyah (JI). Klaim ini muncul di tengah sorotan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjeratnya, dengan dugaan ormas tersebut disiapkan untuk mempertahankan pengaruh Politik dan potensi pengerahan massa.Ormas yang menjadi sorotan utama adalah Garda Satya NKRI. Wadah ini menampung sekitar 6.500 hingga 8.000 mantan anggota dan simpatisan JI, dipimpin oleh Para Wijayanto, mantan Amir (pemimpin tertinggi) JI periode 2008–2019. Organisasi ini lahir setelah deklarasi pembubaran JI pada 30 Juni 2024, yang diikuti rangkaian ikrar kesetiaan kepada NKRI. Listyo, yang saat itu masih menjabat Kapolri, menghadiri silaturahmi akbar bersama sekitar 6.500 anggotanya di Solo pada 30 Agustus 2026 dalam rangka syukuran HUT ke-81 RI.

Tujuan resmi yang disampaikan Listyo dan Polri adalah reintegrasi sosial serta deradikalisasi. Garda Satya NKRI disebut sebagai mitra Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), merawat persatuan, serta mempertahankan keutuhan NKRI. Anggotanya didorong berkontribusi dalam penanganan bencana, penguatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan, kewirausahaan, dakwah, dan kegiatan sosial. Densus 88 Antiteror menyusun peta jalan reintegrasi lima tahun pasca-pembubaran JI, termasuk 19 program pelatihan kemandirian ekonomi seperti teknisi AC, barista, kreator konten, pemasaran digital, agribisnis, dan pendampingan UMKM. Listyo menekankan bahwa bergabungnya mereka dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Namun, sejumlah sumber yang dikutip media menyebut motif berbeda. Menurut sumber di lingkungan penegak huku, Listyo diduga membuat atau mendukung ormas beranggotakan mantan napiter terorisme (serta ormas buruh) karena khawatir kehilangan kekuasaan dan pengaruh setelah digantikan sebagai Kapolri. Langkah itu disebut sebagai upaya membentengi diri, sejalan dengan loyalitas terhadap “Geng Solo”, dan dilakukan dengan sepengetahuan pihak tertentu. Sumber lain di AFU.id menyebut jaringan ormas yang dibina Listyo selama menjabat Kapolri berpotensi dikonsolidasikan untuk pengerahan massa strategis, termasuk kemungkinan “show of force” di sekitar sidang yang melibatkan kesaksian mantan Presiden Joko Widodo.

Klaim-klaim politik ini bersifat spekulatif dan berasal dari sumber anonim, belum dikonfirmasi secara resmi oleh penyidik atau pihak terkait. Secara kelembagaan, program reintegrasi mantan anggota JI telah berjalan di bawah koordinasi Densus 88, BNPT, dan kementerian terkait sejak …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerindra: Mau Geng Solo, Geng Oslo, Hukum Ya Hukum!

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.44 WIB



BANDA ACEH -Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ketua sekaligus Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meyakini Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak akan setengah-setengah mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.Habiburokhman yakin betul di bawah komando Jenderal Suyudi, Polri akan mampu menuntaskan perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

Publik menduga Geng Solo atau kubu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ada di balik peristiwa ini. Habiburokhman menegaskan penegakan hukum tidak boleh pandang bulu.

"Mau Geng Solo, Geng Oslo, hukum ya hukum," tegas Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Ia juga meyakini Suyudi akan menjalankan tugasnya dengan baik dalam mengungkap aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Ya, Pak Suyudi pasti lakukan tugasnya dengan baik, kita percaya ya," pungkasnya.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 3 November 2026.

Ketiganya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan sekretaris pribadinya Irjen Ahrie Sonta (ASN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) yang menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.

Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi.

“Berdasarkan hasil sidik sesuai scientific investigation, penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka, LSP, ASN, dan EH,” kata Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam, 3 November 2026.

Ketiganya diduga melakukan penyadapan di luar tugas institusi kepolisian dalam kurun waktu 2025 hingga Oktober 2026.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

NASIONAL

Publik Curiga Bocor Alus Tempo Selalu Dapat Info Istana, Diduga dari Hasil Sadapan Listyo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.05 WIB

BANDA ACEH - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memicu spekulasi baru di ruang publik.

Sejumlah netizen menduga hasil sadapan tersebut tidak hanya mengalir ke “Geng Solo”, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi podcast *Bocor Alus Politik* Tempo yang selama ini dikenal selalu mendapat bocoran soal dinamika Istana.

Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lainnya—Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso—sebagai tersangka.

Mereka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, hingga pengusaha sepanjang 2025–2026.

Nomor dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum.

Pada Oktober 2026, file hasil sadapan beserta log sistem diduga dihapus, sebelum akhirnya dilaporkan petugas pada 30 Oktober 2026.

Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, memperkuat narasi aliran informasi tersebut.

Ia menyatakan yakin produk final hasil penyadapan sampai ke Solo (yang diasosiasikan dengan “Geng Solo” atau lingkungan Jokowi).

Menurutnya, informasi itu digunakan untuk membaca arah langkah target dan merancang cara mengganggunya.

Mahfud juga menilai tindakan tersebut bisa mengarah ke perbuatan makar.

Dari pernyataan Mahfud itu, spekulasi publik meluas ke podcast Bocor Alus Politik Tempo.

Podcast yang dibawakan jurnalis Tempo ini terkenal dengan “bocoran alus” soal politik Istana, reshuffle, dan manuver di balik layar.

Netizen mengaitkannya dengan fakta bahwa tim Bocor Alus sempat diundang Jokowi ke Solo untuk wawancara, serta kemampuan podcast tersebut secara konsisten menghadirkan informasi yang sulit diakses media lain.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Gerindra Minta Polri Dalami Kemungkinan Upaya Makar Listyo Sigit cs

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.33 WIB

BANDA ACEH - Aparat kepolisian diminta untuk mendalami kemungkinan adanya upaya makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI yang telah menjerat eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resminya, dikutip Rabu, 4 November 2026.

Sugiono berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan seksama, mengingat kedudukan Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

“Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menambahkan bahwa seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah.

Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Sugiono mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan agenda pembangunan nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.

Menurut Sugiono, upaya penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Seluruh unsur pemerintahan diharapkan tetap menjaga koordinasi, soliditas, dan semangat pengabdian agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan secara optimal.

“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, saya meyakini setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pasukan Berani Mati Jokowi Siap Bela hingga Titik Darah Penghabisan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.21 WIB



BANDA ACEH - Loyalitas terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Koordinator Pasukan Berani Jokowi, Sukodigdo Wardoyo, mengklaim organisasinya memiliki jutaan anggota yang tetap berdiri di belakang Jokowi dan siap memberikan pembelaan hingga titik darah penghabisan.Sukodigdo menegaskan, Pasukan Berani Jokowi merupakan kelompok yang memiliki kesetiaan kuat terhadap mantan Presiden tersebut. Menurutnya, Jokowi adalah sosok pemimpin sejati yang tetap mendapatkan dukungan dari para pengikutnya.

Klaim jutaan anggota tersebut tentu menjadi pernyataan Politik yang menarik perhatian. Di tengah dinamika politik nasional dan berbagai kontroversi yang menyeret nama Jokowi, pernyataan Sukodigdo memperlihatkan bahwa loyalitas terhadap mantan Presiden itu masih berusaha ditampilkan sebagai kekuatan politik tersendiri.

Namun, besarnya dukungan yang diklaim tidak cukup hanya diukur dari pernyataan seorang koordinator. Publik tentu berhak mengetahui berapa jumlah anggota yang benar-benar aktif, bagaimana struktur organisasinya, di mana saja jaringannya tersebar, serta apa bentuk kontribusi nyata mereka dalam kehidupan politik dan sosial.

Dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk mendukung tokoh politik pilihannya. Membela Jokowi juga merupakan hak politik yang dijamin selama dilakukan melalui cara-cara konstitusional dan tidak melanggar hukum.

Persoalannya, ungkapan siap membela sampai titik darah penghabisan perlu ditempatkan secara proporsional. Loyalitas kepada seorang pemimpin tidak boleh mengalahkan loyalitas kepada negara, konstitusi, dan hukum.

Jokowi sendiri merupakan mantan Presiden Republik Indonesia yang pernah memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan selama dua periode. Karena itu, penilaian terhadap kepemimpinannya harus terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan pertanggungjawaban publik.

Di sinilah tantangan bagi Pasukan Berani Jokowi. Jika benar memiliki jutaan anggota, kekuatan tersebut semestinya dibuktikan melalui kegiatan organisasi yang terukur, bukan hanya melalui pernyataan heroik dan slogan kesetiaan.

Dukungan politik yang sehat tidak berarti membenarkan seluruh tindakan tokoh yang didukung. Justru loyalitas yang dewasa harus mampu membedakan antara membela seseorang dari fitnah dan membenarkan seseorang ketika melakukan kesalahan.

Demikian pula, Jokowi sebagai mantan kepala negara tidak membutuhkan kekebalan dari kritik. Dalam negara demokrasi, tidak ada pemimpin yang berada di atas hukum, sekalipun memiliki jutaan pendukung.

Pada akhirnya, klaim jutaan anggota Pasukan Berani Jokowi menjadi ujian tersendiri bagi kekuatan politik yang masih berada di belakang mantan Presiden tersebut.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.48 WIB



BANDA ACEH -Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan tidak pernah menunjukkan ijazah fisiknya secara langsung kepada Roy Suryo di luar persidangan.

Jokowi menegaskan, pihak yang melontarkan tuduhan seharusnya bertanggung jawab membuktikan tuduhan tersebut, bukan justru meminta dirinya terus-menerus menunjukkan ijazah.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan pengacara Roy Suryo, Refly Harun, dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

“Apakah Saksi pernah menunjukkan ijazah analog, fisik, kepada terdakwa dan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu?” tanya Refly.

“Tidak, Yang Mulia. Karena dimulai dari tuduhan. Mestinya, yang menuduh itu yang membuktikan,” jawab Jokowi.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi juga ditanya mengenai kesediaannya apabila ijazah fisik yang telah ditunjukkan di persidangan kembali diperiksa di laboratorium forensik.

Namun, Jokowi menyatakan keberatan dengan permintaan tersebut. Ia beralasan ijazah miliknya sudah pernah menjalani pemeriksaan di Laboratorium Forensik (Labfor) Polri.

“Saya keberatan, Yang Mulia. Karena ijazah saya sudah diuji di Labfor, Lab Forensik milik Polri,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa ijazah tersebut merupakan dokumen pribadi sehingga dirinya keberatan apabila harus dibawa dan diperiksa berulang kali di berbagai tempat.

“Ini adalah, sekarang ini ijazah itu adalah dokumen pribadi saya. Jadi, saya merasa keberatan kalau ijazah itu ditenteng-tenteng ke mana-mana,” jelasnya.

Selain itu, Jokowi mendapat pertanyaan mengenai kesesuaian ijazah fisik miliknya dengan file ijazah digital yang diunggah Dian Sandi melalui akun media sosial X. Menjawab pertanyaan tersebut, Jokowi mengaku tidak memeriksa unggahan itu secara terperinci.

“Saya tidak meneliti sampai sedetail itu, Yang Mulia,” ucapnya.

NASIONAL

Menghilang Usai Listyo Sigit Ditangkap, Seskab Teddy Dituding Ikut Khianati Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 14.54 WIB

BANDA ACEH - Penangkapan Listyo Sigit Prabowo atas kasus penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto turut serta membawa nama Seskab Teddy.

Seskab Teddy yang menghilang usai penangkapan Mantan Kapolri tersebut disebut-sebut ikut serta terlibat.

Terlebih lagi belakangan ini narasi pergantian Seskab Teddy marak terdengar dan dikaitkaitkan dengan penyadapan presiden.

Orang kepercayaan Presiden Prabowo tersebut diisukan akan diganti oleh rekannya sendiri yakni Kapten Dali Darulqutni.

Namun isi tersebut belum terbukti kebenarannya karena hingga detik ini belum adanya pernyataan resmi dari pemerintahan.

Listyo Sigit sendiri menjadi tersangka bersama dua jendral lainnya dan kini telah ditangkap.

Aksi penyadapan yang dilakukannya telah berlangsung sejak 2025 dan pada Oktober 2026 ia menghapus file jejak penyadapannya untuk memnghilangkan barang bukti.

Adapun target penyadapan selain presiden juga diduga menyasar sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh Politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM dan pengusaha.

Menurut penyidik, diduga tersangka memerintahkan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.

Modusnya, sejumlah nomor telepon tersebut dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Sementara menurut aturan penyadapan seharusnya dilakukan sesuai prosedur dan kewenangan hukum.

Adapun dugaan penyadapan berlangsung sejak 2025 hingga 2026.

Pada Oktober 2026 penyidik menduga ada perintah untuk menghapus file hasil penyadapan yang tersimpan dalam komputer sistem LIMS.

Adapun barang bukti dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa sepuluh orang saksi tiga orang saksi ahli.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Profil Komjen Wahyu Hadiningrat, Wakapolri yang Disebut Pimpin Penangkapan Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 14.45 WIB

BANDA ACEH - Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat bersama Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin disebut memimpin langsung penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Selasa (3/11/2026).

Listyo diduga terlibat dalam kasus penyadapan ilegal yang berlangsung pada 2025-2026 ketika dia masih menjabat sebagai Kapolri.

Dalam perkara ini, dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, juga ditetapkan sebagai tersangka.

Kronologi peristiwa itu diungkap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Ia menyebut, sebelum Listyo ditetapkan sebagai tersangka, enam perwira Polri berpangkat Irjen dan Kombes lebih dahulu ditangkap.

Menurut Mahfud, keenam perwira tersebut mengaku melakukan penyadapan atas perintah Listyo. Sasaran penyadapan diduga termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Saya mendengar ini bukan tadi pagi (Rabu) tapi kemarin pagi (Selasa) saya sudah mendengar karena penangkapan itu sebenarnya sudah dilakukan pada Minggu malam terhadap enam orang di luar LSP (Listyo Sigit Prabowo) di rumah seorang mantan Kapolri sudah ditangkap tiga irjen dan kombes," kata Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (3/11/2026).

Mahfud mengaku telah mengetahui identitas para perwira yang diamankan. Namun, ia memilih tidak mengungkapkannya ke publik karena masih menunggu perkembangan penanganan perkara di Mabes Polri.

Ia kemudian menyebut keenam perwira tersebut mengungkap pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan.

Setelah itu, Listyo disebut dijemput oleh Wakapolri dan Kabareskrim.

"Dari enam orang itu menyebut bahwa mereka menyadap Presiden dan Seskab. Terus mengaku siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan itu Kapolri (Listyo Sigit Prabowo). Lalu tengah malam dijemput itu LSP. Yang jemput itu Wakapolri dan Kabareskrim," ungkapnya.

Mahfud menambahkan, Listyo sempat dilepaskan sekitar pukul 05.00 WIB pada Selasa dini hari. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti di balik keputusan tersebut.

Namun, Mahfud menduga pelepasan itu berkaitan dengan ancaman Listyo yang disebut akan membongkar sejumlah rahasia petinggi negara.

Meski demikian, proses hukum di Mabes Polri disebut tetap berlanjut hingga Listyo …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Bantah Font Skripsinya Tak Sesuai Zaman: Bukan Hanya Saya

Oleh Redaksi · 5 Nov, 11.55 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan soal bentuk huruf atau font pada sampul skripsinya tidak sesuai zaman. Dia menjelaskan kover skripsinya saat itu dicetak di Percetakan Perdana dan bukan hanya miliknya yang menggunakan font tersebut."Kalau dikatakan bahwa kovernya pakai Times New Roman yang itu belum ada di tahun 1985, nyatanya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana itu semuanya juga seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja, Yang Mulia," kata Jokowi dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Jokowi menjelaskan proses pencetakan skripsi dilakukan setelah dinyatakan lulus ujian pada 23 Oktober 1985. Dia menyebut skripsinya sempat mengalami revisi sebelum dicetak.

"Dan pada tanggal 23 Oktober 1985 dilakukan ujian skripsi dengan dosen penguji Insinyur Sofyan Warsito dan Insinyur P Burhanuddin. Saya dinyatakan lulus dengan nilai A," katanya.

"Kemudian setelah sedikit revisi, skripsi itu saya cetak di Percetakan Perdana, dengan kover dan lembar pengesahan oleh Percetakan Perdana, kemudian halaman yang lainnya saya lakukan dengan ketik manual," imbuh dia.

Jokowi mengatakan skripsinya berjudul 'Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta'. Dia menyebut judul itu disetujui oleh dosen pembimbing, Achmad Soemitro, setelah mengajukan proposal sebanyak tiga kali.

"Saya ingin menyampaikan bahwa skripsi ini kami buat dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Prof Dr Ir Achmad Soemitro. Kemudian disetujui judul skripsinya adalah 'Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta'," ujarnya.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Jaksa mengatakan Roy Suryo menyebarkan informasi tidak benar soal ijazah Jokowi.

Akibat perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana subsider Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

NASIONAL

Jokowi Pertanyakan Tudingan Ijazah Pakai Foto Dumatno Budi Utomo: Saat Itu Umurnya Baru 8 Tahun

Oleh Van · 5 Nov, 17.23 WIB



Presiden Joko Widodo saat menunjukkan sebuah dokumen penting dalam suatu acara resmi.

JAKARTA — Persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 5 November 2026 kembali menjadi perhatian.

Dalam persidangan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa foto di ijazah Strata 1 (S1) tersebut adalah dirinya, bukan sosok lain.

Jokowi menepis tudingan bahwa foto di ijazah adalah Dumatno Budi Utomo, saudara jauhnya.

“Tadi di situ kan ada foto ya Saudara saksi, ya? Ada foto. Itu foto Saudara saksi atau foto Dumatno Budi Utomo?” tanya jaksa di persidangan.

“Foto saya Yang Mulia. Untuk apa dipasang fotonya Dumatno Budi Utomo?” jawab Jokowi.

Jokowi juga mengaku dirinya berkumis dan memakai kacamata saat foto ijazah S1.

Mengenai hubungan dengan Dumatno, ia mengaku mengenalnya karena ia adalah sepupu jauh.

“Dumatno Budi Utomo ini adalah sepupu saya, sepupu jauh dari kakek. Dia lahir 1977. Artinya, pada saat saya lulus, dia masih umur 8 tahun,” jelas Jokowi.

Jokowi juga mempertanyakan kabar yang beredar bahwa foto ijazahnya menggunakan foto orang lain.

“Pertanyaannya, untuk apa ijazah yang saya peroleh, saya ganti foto Dumatno. Mestinya kebalik, mestinya Dumatno lulus apa, saya pasangi foto saya. Kan seperti itu,” imbuhnya.

“Sekali lagi, saat itu umurnya baru 8 tahun,” tegasnya.

Nama Dumatno Budi Utomo muncul pada 12 November 2025 saat Roy Suryo menyebut bukan Jokowi dalam foto yang tertempel di ijazah.

Saat itu, Roy Suryo menyampaikan ada perbedaan fisik antara wajah dalam ijazah dan wajah Jokowi yang dikenal masyarakat.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menyebut bibir, leher, hingga bentuk wajah tidak sesuai dengan ciri khas Jokowi dan menurutnya, dekat dengan sosok bernama Dumatno.

Roy Suryo, ketika itu juga telah membuka identitas Dumatno sebagai sepupu Jokowi. (*)

NASIONAL

Yusril Sebut Dugaan Motif Listyo Sadap Presiden untuk Lumpuhkan Kekuasaan Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.38 WIB

BANDA ACEH - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidik Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan dalam kasus penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Menurut Yusril, dugaan tersebut muncul dari pengembangan penyidikan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan dan intersepsi elektronik terhadap Presiden.

“Kalau dikatakan (untuk) membunuh, ya tidak. Tapi mengarah kepada satu keinginan untuk melumpuhkan Presiden sehingga tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami oleh para penyidik Bareskrim saat ini,” kata Yusril dalam konferensi pers di Banda Aceh, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, penyidik tidak hanya mendalami perbuatan penyadapan, tetapi juga motif, tujuan, serta arah penggunaan hasil penyadapan tersebut.

Pada tahap awal, penyidik telah menetapkan tersangka berdasarkan dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi elektronik. Namun, setelah perkara dikembangkan, ditemukan indikasi yang mengarah pada dugaan upaya membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Yusril menyebut, dugaan tersebut berkaitan dengan rumusan Pasal 191 KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal itu mengatur makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Meski demikian, Yusril menegaskan kemungkinan penerapan pasal tersebut masih didalami penyidik dan belum menjadi kesimpulan final.

“Ada pasal-pasal lain juga terkait dengan makar, karena ada pemerintahan itu dimaksudkan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Dasco Masuk Bursa Pengganti Gibran? Pengamat Bongkar Skenario Politik Prabowo

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.31 WIB

BANDA ACEH - Peta Politik nasional berpotensi berubah drastis jika jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terguncang oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di tengah spekulasi tersebut, muncul dua nama yang disebut-sebut berpeluang masuk dalam radar Presiden Prabowo Subianto: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai Prabowo kemungkinan besar akan memilih sosok pengganti dari lingkaran dalam koalisi pemerintahan apabila MK membatalkan pelantikan Gibran.

Mengingat Kembali Pernyataan Kepala Bakom Syahganda Nainggolan: Gibran Tak Bisa Dimakzulkan

Elnusa Terus Bangun SDM Unggul dan Budaya Berkinerja Tinggi untuk Perkuat Resiliensi Bisnis

Menurut Ray, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut posisi wakil presiden, melainkan juga berpotensi memicu turbulensi politik di internal koalisi pendukung pemerintah.

Namun, ia meyakini gejolak tersebut masih bisa dikendalikan oleh Prabowo. Karena itu, kecil kemungkinan Prabowo mencari figur dari luar lingkaran koalisi.

“Cuma kalau soal gejolak internal tentu bisa di-manage oleh Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo enggak akan mencari (wapres) dari luar,” kata Ray Rangkuti dikutip pada (4/11/2026).

Ray bahkan menyebut nama Bahlil Lahadalia sebagai salah satu kandidat paling kuat. Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil dinilai memiliki posisi strategis dalam konfigurasi politik pemerintahan.

Namun, ada satu nama lain yang menurut Ray patut diperhitungkan: Sufmi Dasco Ahmad.

Ia mengaitkan kemungkinan tersebut dengan hasil reshuffle kabinet sebelumnya. Ray melihat adanya sejumlah figur yang dinilainya berseberangan dengan Jokowi dan memiliki kedekatan politik dengan Dasco.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wakil Wali Kota Sabang Hadiri Pertemuan Eksekutif CityNet, Perkuat Jejaring Kerja Sama Antarkota

Oleh Redaksi · 4 Nov, 20.02 WIB

SABANG – Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus menghadiri 46th CityNet Executive Committee (ExCom) Meeting yang berlangsung pada 2-5 November 2026 di Hotel Pullman Jakarta Thamrin CBD. Pertemuan ini menjadi wadah memperkuat kolaborasi antarkota di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dalam mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh CityNet National Chapter Indonesia (NCI) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, para bupati dan wali kota anggota CityNet NCI, serta berbagai lembaga mitra dan pengurus terkait.

Suradji mengatakan, forum CityNet menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat komunikasi, membangun kemitraan, serta bertukar pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.

“Setiap daerah tentu memiliki potensi dan tantangan yang berbeda. Melalui forum seperti ini, kita bisa saling berbagi pengalaman, belajar dari keberhasilan daerah lain, sekaligus membangun kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan masing-masing kota,” ujarnya.

Selama kegiatan, peserta mengikuti sejumlah agenda, di antaranya ExCom Meeting, Jakarta SDG Showcase & Host City Awards, Jakarta Youth SDGs, 5th SDG City Awards, kunjungan lapangan teknis, serta Welcome & Farewell Dinner.

Menurutnya, berbagai agenda tersebut juga memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melihat langsung praktik pembangunan perkotaan, inovasi pelayanan, serta upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

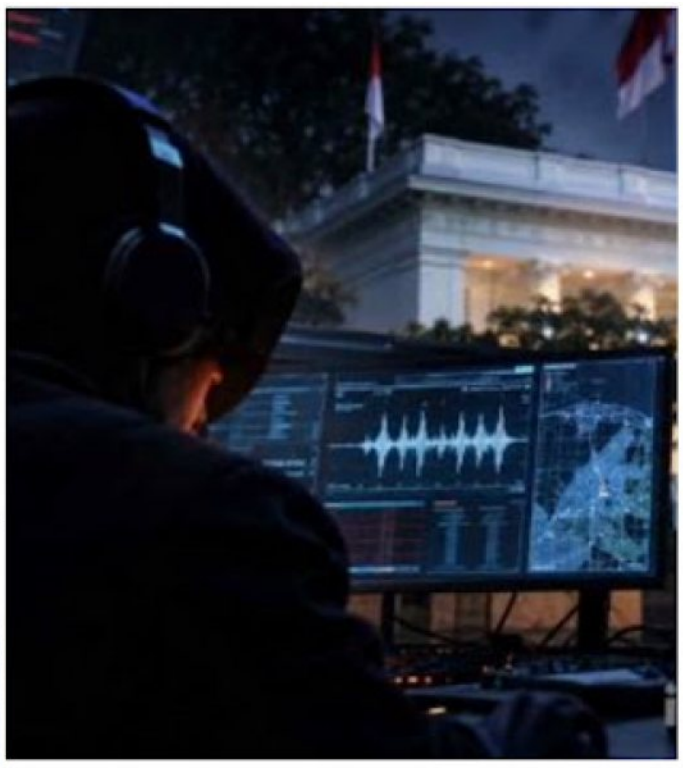
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Perkembangan Terbaru, Seorang Ketum Partai Disebut Terlibat Kasus Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 5 Nov, 10.57 WIB





BANDA ACEH – Informasi terbaru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Bareskrim Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka, sementara spekulasi publik dan sejumlah pernyataan menyebut kemungkinan keterlibatan aktor Politik, termasuk ketua umum (ketum) partai politik.Berdasarkan keterangan resmi Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026), tiga tersangka berinisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan), ASN (Irjen Ahrie Sonta Nasution, Kadivkum Polri), dan EH (Irjen Eko Hadi Santoso) diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur sesuai Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Aktivitas tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dengan memasukkan sejumlah nomor ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi atau kaitan penegakan hukum. Pada Oktober 2026, terdapat dugaan penghapusan file hasil sadapan untuk menghilangkan jejak.

Sasaran penyadapan tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Tokoh politik yang disebut termasuk elite partai, sehingga muncul kabar beredar bahwa para ketua umum parpol turut menjadi target. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengisyaratkan proses pengembangan kasus masih berjalan dan membuka peluang tersangka bertambah, termasuk kemungkinan aktor politik maupun pihak asing di balik operasi tersebut. Yusril menegaskan Presiden Prabowo sudah menerima laporan langsung.

Pihak Istana, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, menilai dugaan penyadapan ini "mengarah ke perbuatan makar" karena membahayakan keselamatan kepentingan negara dan pimpinan negara. Listyo Sigit sendiri telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan melalui Keputusan Presiden. Sekjen Partai Gerindra Sugiono menduga motifnya bersifat politis dan berpotensi insubordinasi, serta membuka peluang konsolidasi dengan ketum parpol koalisi maupun lainnya untuk menyikapi kasus yang menyangkut kepala negara sekaligus ketua umum Gerindra.

Dalam ruang publik dan media alternatif, pernyataan dari kanal serta akun terkait Obor Rakyat turut memperbesar spekulasi. Sejumlah unggahan dan podcast Obor Rakyat Reborn membahas alur terbongkarnya kasus. Dalam video reel Instagram resmi akun Obor Rakyat Reborn (@oborrakyatreborn) yang berjudul "KETUA PARTAI TERLIBAT KONSPIRASI PENYADAPAN PRESIDEN", host Setiyardi Budiono menyampaikan perkembangan terbaru penyelidikan.

"Perkembangan terbaru dari penyelidikan konspirasi penyadapan presiden oleh jenderal-jenderal polisi. Ternyata ada ketua umum partai yang terlibat", ungkapnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Habiburokhman Sebut Polemik Gibran Mungkin Sudah Dibahas di Dewa-dewa Langitan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.51 WIB



BANDA ACEH -Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disambut putusan Mahkamah Agung (MA) perihal polemik penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, diyakini sudah dibahas di level elite Politik.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, 5 November 2026.

Namun begitu, Habiburokhman mengaku belum mengetahui pasti apakah pembahasan tersebut sudah dilakukan lintas fraksi.

"Oh belum tahu. Mungkin sih di antara dewa-dewa langitan pasti sudah ada," seloroh Habiburokhman.

Ia enggan berspekulasi lebih jauh mengenai kepastian dan isi pembahasan di level elite politik perihal polemik ijazah putra sulung mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Mungkin ya, di para-para bos-bos kami ya. Kami kan anak buah, pelaksana aja," pungkasnya.

MA mengabulkan kasasi gugatan surat keterangan (Suket) penyetaraan sekolah menengah atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lewat amar putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan atau Suket penyetaraan SMA Gibran yang menjadi syarat pencalonannya di Pilpres 2024 tidak sah.

Amar putusan tersebut dibacakan hari ini, Jumat, 30 Oktober 2026, dan dikonfirmasi HM Subhan selaku penggugat dalam perkara tersebut lewat nomor putusan kasasi 742 K/TUN/2026.

"Saya dapat pemberitahuan melalui e-court saya dari MA. Tanggal 30 Oktober 2026. Terhadap proses nomor 742/K/TUN/2026, amar putusannya kabul kasasi," kata Subhan.

Sebelum MA, MK juga memutuskan persoalan ijazah Gibran ini. MK menolak gugatan tersebut. Namun, dalam pertimbangan, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah kelulusan luar negeri yang setara SMA.

NASIONAL

Mahfud Ungkit Isu Prabowo Cuma 2 Tahun Jadi Presiden, Singgung Connie Rahakundini

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.29 WIB



BANDA ACEH - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkit pernyataan pengamat isu intelijen Connie Rahakundini Bakrie pada 2024 mengenai isu masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang disebut hanya dua tahun. Mahfud menyinggung pernyataan tersebut ketika membahas dugaan motif politik di balik kasus penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon kepala negara.Menurut Mahfud, Connie kala itu pernah menyampaikan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo melalui Rosan Roeslani disebut pernah menyatakan jatah Prabowo menjadi presiden hanya dua tahun. Ia kemudian mengaitkan pernyataan tersebut dengan rangkaian dinamika politik yang terjadi setelahnya.

"Ibu Connie dikejar-kejar sampai pergi ke Rusia ngajar lagi. Padahal pergi ngajar lagi karena mau ditangkap, mau apa gitu," tutur Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya, Rabu (4/11/2026).

Mahfud juga menilai pernyataan Connie tersebut patut diperhatikan. Ia menghubungkan isu itu dengan polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo dan persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe dan Kajati Aceh Sepakat Perkuat Sinergi Lembaga

Oleh Redaksi · 4 Nov, 19.45 WIB

BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Teuku Rahmatsyah, beserta rombongan di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Selasa (3/11/2026).

Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris menyebutkan, pertemuan itu menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Lembaga Wali Nanggroe dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, khususnya dalam mendukung penguatan regulasi, tata kelola kelembagaan, serta pembangunan Aceh ke depan.

Rahmatsyah menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus memperkenalkan diri sebagai pimpinan baru Kejaksaan Tinggi Aceh.

Dia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui komunikasi dan koordinasi antarlembaga, termasuk dalam berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan Aceh.

Kajati Aceh juga mengharapkan bimbingan, arahan, serta pandangan Wali Nanggroe dalam memahami sejarah, dinamika, dan arah pembangunan Aceh di masa mendatang.

Menurutnya, petuah dan pemikiran Wali Nanggroe menjadi masukan penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Kejaksaan Tinggi Aceh, terutama dalam memahami kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah peluang kolaborasi dalam penguatan landasan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan kelembagaan Wali Nanggroe.

Rahmatsyah berharap Kejati Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe dapat membangun kerja sama yang konstruktif, terutama dalam pembahasan dan penyusunan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan maupun qanun yang relevan dengan penguatan kelembagaan Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menyambut baik semangat silaturahmi dan penguatan hubungan kelembagaan yang disampaikan Kajati Aceh.

Dalam konteks pembahasan tersebut, Wali Nanggroe menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman mengenai sejarah Aceh, kedudukan kekhususan dan keistimewaannya, serta tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlanjutan perdamaian dan pembangunan daerah.

Wali Nanggroe memandang bahwa penguatan kelembagaan di Aceh perlu berjalan seiring dengan pemahaman terhadap sejarah dan landasan hukum yang melahirkan berbagai kewenangan khusus Aceh, termasuk keberadaan Lembaga Wali Nanggroe.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Cetak Sejarah Mantan Presiden RI Pertama Duduk di Kursi Persidangan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.15 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mencatat sejarah dengan menjadi mantan presiden pertama di Indonesia yang hadir langsung di ruang persidangan.

Jokowi dilaporkan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026, untuk menjadi saksi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo.

Setibanya di pengadilan bersama anaknya Kaesang dan Kahiyang, Jokowi menyatakan telah membawa ijazah asli UGM yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.

Kedatangan Jokowi mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk memastikan jalannya persidangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur, berlangsung aman dan kondusif.

Sementara itu, kapasitas pendukung yang diperbolehkan memasuki ruang sidang utama dibatasi hanya 80 orang, masing-masing 40 orang dari kedua kubu.

Kehadiran Jokowi di persidangan menjadi catatan tersendiri jika dibandingkan dengan para pendahulunya.

Sejumlah mantan presiden RI sebelumnya juga pernah bersinggungan dengan persoalan hukum, baik sebagai pihak yang melaporkan maupun dilaporkan.

Presiden ke-2 RI Soeharto pernah menghadapi perkara terkait pengelolaan dana yayasan dan menggugat majalah TIME Asia pada tahun 2007. Sedangkan Presiden ke-3 RI BJ Habibie pernah dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara hukum yang berkaitan dengan kasus korupsi.

Lalu Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri melalui perwakilan hukum PDI Perjuangan pernah melaporkan Faizal Assegaf dan Pemimpin Redaksi Inilah.com pada 2014 terkait transkrip percakapan yang dianggap mencemarkan nama baiknya.

Adapun Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melaporkan Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif pada 2007 terkait isu pernikahannya sebelum masuk Akademi Militer. Pada 2018, SBY kembali melaporkan Firman Wijaya, pengacara Setya Novanto, ke Bareskrim Polri karena merasa namanya dicemarkan akibat dikaitkan dengan kasus korupsi e-KTP.

Perkara yang menyeret Roy Suryo bermula pada 2025, ketika mantan Menpora tersebut bersama Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadhillah hingga aktivis Kurnia Tri Royani mempertanyakan keaslian ijazah Sarjana Kehutanan Jokowi dari UGM.

Padahal, pihak UGM telah menyatakan ijazah tersebut asli. Jokowi diketahui menempuh 160 SKS dan memperoleh ijazah Sarjana Kehutanan bernomor 1120 tertanggal 5 November 1985.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jadi Tersangka, Slamet Ulijandi Beri Izin Penghapusan Berkas Kasus Penyadapan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 21.59 WIB



BANDA ACEH - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan SU sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal. SU diduga berperan memberikan izin menghapus berkas penyadapan."Pada awal Oktober 2026, tersangka AS meminta izin untuk melakukan penghapusan hasil penyadapan kepada SU, dan tersangka SU meng-acc melakukan penghapusan terhadap file hasil penyadapan selama ini," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Mabes Polri, Jakarta, Kamis malam, 5 November 2026.

Tersangka SU memiliki posisi penting sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri serta pernah menjabat sebagai Kabag Monitoring Bareskrim pada 2010 hingga 2019. Setiap tindakan penyadapan yang dilakukan oleh tersangka EH dan AS harus melalui izin SU.

"Harus mendapat izin dari saudara SU," ujar Suhermanto.

Total tersangka dalam kasus tersebut kini berjumlah empat orang. LSP, ASN, dan EH telah ditahan di Mako Brimob, sementara tersangka SU belum dapat ditahan karena terkendala kondisi kesehatan.

"Untuk tersangka SU, saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," terang Suhermanto.

Guna melengkapi berkas perkara, penyidik juga telah memeriksa belasan saksi serta sejumlah ahli di bidang teknologi dan hukum pidana. "Jumlah saksi yang sudah kami periksa sebanyak 13, dan ahli sebanyak 5 orang, terdiri dari ahli ITE 3 orang dan ahli pidana 2 orang," ujar Suhermanto.

NASIONAL

Breaking News! Irjen Slamet Uliandi Tersangka Baru Penyadapan Presiden, Total 4 Jenderal

Oleh Redaksi · 5 Nov, 20.11 WIB



BANDA ACEH - - Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan menyimpulkan Slamet memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

"Insial SU tersangka yang sebelumnya saksi. Hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan SU memenuhu unsur perbuatan melawan hukum," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Humas Polri, Kamis (5/11/2026).

Brigjen Suhermanto menjelaskan, Irjen Slamet Uliandi memiliki peran sebagai pembina MC Bareskrim Polri.

"Peran sebagai dewan pembina MC Bareskrim Polri, yang bersangkutan pernah menjabat Kabag monitoring Bareskrim 2010-2019," ujarnya.

Dengan penetapan tersebut, Irjen Slamet yang sebelumnya berstatus saksi kini menjadi tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Penetapan Irjen Slamet menambah jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi empat jenderal. Sebelumnya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi Santoso telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh Politik, media, organisasi kemasyarakatan, hingga pengusaha.

Penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan para pihak dalam perkara penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal tersebut

TEKNOLOGI

Waspada! Spyware Canggih Incar Pengguna iPhone di Puluhan Negara, Begini Cara Melindungi HP

Oleh Van · 4 Nov, 21.54 WIB

JAKARTA — Pengguna iPhone perlu mewaspadai ancaman perangkat lunak mata-mata atau spyware canggih yang dapat digunakan untuk menyerang perangkat secara tertarget.

Apple kembali mengirimkan notifikasi ancaman kepada sejumlah pengguna yang diduga menjadi sasaran serangan mercenary spyware. Dilansir dari lama The Telegraph Rabu, (4/11/2026) peringatan tersebut dilaporkan menjangkau pengguna di 99 negara.

Informasi mengenai gelombang peringatan terbaru ini disampaikan periset keamanan siber Costin Raiu melalui akun X miliknya @costinrau.

Dia menyebut notifikasi tersebut berbeda dari gelombang peringatan yang dikirim Apple pada Agustus 2026.

Apple menyatakan telah mengirimkan notifikasi ancaman kepada pengguna di lebih dari 150 negara sejak program peringatan tersebut dimulai.

Perusahaan tidak mengungkap identitas pelaku maupun wilayah geografis yang diduga menjadi sumber serangan.

Apa Itu Mercenary Spyware?

Mercenary spyware merupakan perangkat lunak mata-mata yang dikembangkan untuk menjalankan operasi pengawasan terhadap individu tertentu.

Berbeda dari malware yang menyebar secara massal, spyware jenis ini biasanya digunakan untuk menargetkan orang berdasarkan identitas, aktivitas, atau pekerjaan mereka.

Apple menjelaskan bahwa serangan semacam ini membutuhkan biaya dan sumber daya besar. Pengembangannya bahkan dapat menelan biaya hingga jutaan dolar AS.

Karena itu, target serangan biasanya bukan pengguna secara acak. Kelompok yang berisiko menjadi sasaran antara lain jurnalis, aktivis, politikus, diplomat, serta individu yang memiliki informasi strategis.

Apple juga menegaskan bahwa notifikasi ancaman dikirim ketika perusahaan memiliki tingkat keyakinan tinggi bahwa seseorang menjadi target serangan.

Namun, menerima peringatan tidak otomatis berarti perangkat sudah berhasil diretas.

Serangan Bisa Dilakukan Tanpa Korban Mengeklik Tautan

Salah satu metode yang dapat digunakan dalam serangan spyware canggih adalah zero-click exploit.

Melalui metode ini, penyerang berupaya mengeksploitasi celah keamanan perangkat tanpa mengharuskan korban mengeklik tautan atau mengunduh berkas tertentu.

Jika serangan berhasil, penyusup berpotensi memperoleh akses ke informasi pribadi yang tersimpan dalam perangkat.

Informasi tersebut dapat mencakup pesan, riwayat panggilan, daftar kontak, lokasi, hingga foto dan video.

Meski demikian, Apple belum mengungkap metode teknis maupun celah keamanan yang digunakan dalam gelombang serangan terbaru.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Bersaksi di Sidang Kasus Ijazah, Kubu Roy Suryo Siapkan 500 Pertanyaan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 10.38 WIB



BANDA ACEH - Terdakwa tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menyiapkan lebih dari 500 pertanyaan yang akan diajukan kepada Jokowi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian.

"Dalam kesempatan sidang nanti, kami akan banyak menggali tidak hanya yang terkait dengan dakwaan yang sudah didakwakan kepada terdakwa, tetapi juga hal-hal lain yang pastinya relevan, yaitu menyangkut keaslian ijazah," kata kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun saat menayampaikan pernyataan pembuka dalam persidangan.

Refly menyebut ada sejumlah hal yang akan ditanyakan kepada Jokowi. Pertama, mengenai laporan polisi dan pasal-pasal dalam dakwaan. Tim hukum Roy juga akan menyoroti berita acara pemeriksaan (BAP) hingga riwayat hidup Jokowi.

"Berikutnya kami juga akan bicara tentang riwayat pendidikan, di mana kita tahu bahwa riwayat pendidikan inilah yang kemudian banyak dipersoalkan. Dan last but not least, terakhir kami akan mempermasalahkan tentang ijazah fisik itu sendiri versus ijazah yang di-upload di internal," ucap Refly.

Dia mengungkapkan tim kuasa hukum telah menyiapkan lebih dari 500 pertanyaan. Namun, tidak seluruh pertanyaan tersebut dipastikan dapat disampaikan dalam persidangan.

"Kami sudah menyiapkan 500 pertanyaan lebih, tetapi tentu tidak semua pertanyaan tersebut bisa kita sampaikan. Tetapi kami meminta waktu yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya," tutur dia.

Refly juga mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas selama persidangan berlangsung. Dia berharap semua pihak dapat menghormati jalannya sidang dan memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum untuk menyampaikan pertanyaan.

"Kita saling menjaga martabat sidang ini. Dan kami mohon waktu yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pertanyaan tersebut dan mohon kita tidak saling mengganggu dalam persidangan nanti selanjutnya," pungkasnya.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Singgung Etika Roy Suryo: Peneliti Tak Seperti Ini, Datang ke UGM Bawa Rombongan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.22 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyinggung etika Roy Suryo yang selama ini mengaku sebagai peneliti ijazahnya. Jokowi menilai, sikap Roy Suryo tidak mencerminkan etika seorang peneliti.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazah dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Awalnya, jaksa penuntut umum menanyakan apakah Jokowi keberatan dengan salah satu pernyataan Roy Suryo dalam tayangan televisi.

"Terhormat Bapak Roy Suryo menyampaikan sebagai peneliti. Untuk saya bukan peneliti," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian menyinggung etika seorang peneliti. Menurutnya, peneliti tidak seharusnya membawa rombongan saat mendatangi Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Peneliti etikanya tidak seperti ini. Datang ke UGM, membawa satu rombongan," ucapnya.

Namun, majelis hakim menyela pernyataan tersebut dan meminta Jokowi menjawab pertanyaan jaksa sesuai dengan pokok perkara.

"Mohon dijawab saja pertanyaannya, bukan komentar seperti yang disampaikan," ujar hakim.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen.

Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tudingan ijazah S-1 Jokowi tidak asli.

Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

ACEH

Pangdam Im Kunjungi Kodim 0114/Aceh Jaya, Tekankan Disiplin dan Integritas Prajurit

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.04 WIB

BANDA ACEH, ACEH JAYA – Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda (Pangdam IM) Brigadir Jenderal TNI Mahesa Fitriadi, S.A.P., M.M., didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Daerah Iskandar Muda, Ny. Gading Mahesa, melaksanakan kunjungan kerja ke Kodim 0114/Aceh Jaya, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pembinaan satuan sekaligus untuk melihat secara langsung kondisi dan kesiapan satuan serta memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh prajurit dan PNS TNI di lingkungan Kodim 0114/Aceh Jaya.

Kedatangan Pangdam IM beserta rombongan disambut langsung oleh Komandan Kodim (Dandim) 0114/Aceh Jaya Letkol Czi Aris Widiatmoko, S.I.P., beserta istri dan jajaran personel Kodim 0114/Aceh Jaya.

Dalam arahannya, Pangdam IM menegaskan bahwa setiap prajurit harus senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kedinasan secara profesional, disiplin, serta dilandasi loyalitas dan integritas yang tinggi. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas satuan tidak terlepas dari komitmen, dedikasi, dan tanggung jawab setiap personel dalam menjalankan amanah sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.

Selain itu, Pangdam IM mengingatkan seluruh personel agar senantiasa menjaga diri dan keluarga dengan menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak masa depan, seperti pinjaman online (pinjol) ilegal, judi online (judol), penyalahgunaan narkoba, serta tindakan lain yang bertentangan dengan aturan dan norma keprajuritan.

Ia menekankan bahwa pelanggaran tersebut bukan hanya berdampak terhadap karier dan kehormatan prajurit, tetapi juga dapat merusak keharmonisan rumah tangga serta menimbulkan persoalan serius bagi keluarga. Oleh karena itu, setiap personel dituntut untuk mampu mengendalikan diri, bijak dalam mengambil keputusan, serta senantiasa menjadikan nilai-nilai moral dan disiplin sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Pangdam IM juga berharap seluruh personel Kodim 0114/Aceh Jaya terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat soliditas dan kebersamaan, serta senantiasa menjaga kehormatan dan nama baik satuan. Setiap tugas yang diberikan hendaknya dilaksanakan secara optimal, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara.

Kunjungan kerja tersebut turut didampingi oleh Asisten Perencanaan Kasdam IM (Asrendam IM), Asisten Operasi Kasdam IM (Asops Kasdam IM), serta sejumlah pejabat dan personel pendukung Kodam Iskandar Muda.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin komunikasi dan hubungan yang semakin erat antara pimpinan dan seluruh prajurit, sekaligus menjadi motivasi bagi personel Kodim 0114/Aceh Jaya untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, menjaga disiplin …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Irit Bicara Diminta Tanggapi Kasus Listyo Sigit

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.38 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jokowi merespons singkat saat ditanya awak media di sela persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," ujar Jokowi kepada wartawan di sela persidangan.

Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kasus tersebut.

Ia langsung meninggalkan area persidangan untuk menuju ruang transit.

Jokowi selanjutnya akan kembali memberikan kesaksian dalam persidangan perkara yang sama dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

NASIONAL

Hubungan Dekat Jokowi-Listyo Sigit Sulit Dipisahkan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.25 WIB



BANDA ACEH -Dengan ditetapkannya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka kasus penyadapan, penghapusan data, dan ilegal akses, terhadap Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya, maka apa pun yang dilakukan LSP di eranya terkait Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi, seperti kasus dugaan ijazah palsu, diragukan keobjektifannya.

Demikian pandangan Direktur ABC Riset & Consulting Erizal, dikutip Kamis 5 November 2026.

Erizal melihat setidaknya ada enam alasan objektifitas kasus yang menyenggol Jokowi dan keluarganya diragukan penanganannya di era Listyo Sigit.

"Pertama, hubungan yang sangat dekat antara LSP dan Jokowi. Ini sudah menjadi rahasia umum sulit dibantah," kata Erizal.

Bagaimanapun cara memisahkannya sulit dipisahkan. Tindak pidana seseorang memang tak bisa dikaitkan dengan orang lain. Kecuali, bisa dibuktikan dengan bukti-bukti terang melebihi terangnya cahaya. Tapi, kecurigaan itu sulit untuk dibatasi.

Kedua, dari begitu banyak dugaan pejabat dan elite di negeri ini yang disadap sejak lama oleh LSP, puncaknya Presiden Prabowo sendiri, Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk daftar orang yang disadap.

"Ini logika akal sehat kita saja sudah bisa menyimpulkan apa sebenarnya yang terjadi. Bersuluh matahari bergelanggang di mata orang banyak. Sulit untuk ditutup-tutupinya," kata Erizal.

Ketiga, kasus pencemaran ijazah yang dialami Roy Suryo cs, sudah menjadi rahasia umum juga mangkrak lama, bolak-balik dari penyidik ke jaksa. Betapa rumitnya kasus yang terbilang mudah ini?

Kuasa hukum Bonjowi Petrus Selestinus, pernah mengatakan bahwa kasus pencemaran ijazah ini, bukan seperti pencemaran, tapi justru dugaan ijazah palsu itu sendiri.

Keempat, pemaksaan-pemaksaan yang sempat dilakukan seperti penggerebekan rumah Roy Suryo dan Dokter Tifa, yang terbukti menyalahi prosedur di praperadilan, termasuk penahanan yang tidak jadi dilakukan, meski sempat dilakukan.

Kemudian dakwaan JPU terhadap Dokter Tifa, yang sempat dibatalkan demi hukum oleh Majelis Hakim. Ini juga indikasi lemahnya.

Kelima, sepanjang persidangan yang sudah berjalan, kasus pencemaran ini tidak jelas ujung dan pangkalnya, baik kalau benar ijazah itu asli atau palsu sekalipun.

Malah, yang banyak dibahas diskusi di ILC dan Rakyat Bersuara, yang hostnya sendiri, Aiman Witjaksono, tidak mau bersaksi di persidangan, bahkan sejak awal dipanggil oleh penyidik.

Keenam, kehadiran Jokowi sebagai saksi pelapor pada sidang tanggal 5 November besok, awalnya sangat menarik diikuti, tapi setelah pentersangkaan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Pengakuan Jokowi: Tiga Kali Revisi Judul Skripsi, Dapat Nilai A

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.18 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan harus mengajukan proposal judul skripsi hingga tiga kali sebelum akhirnya menjalani sidang akhir di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 23 Oktober 1985.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

"Yang Mulia, dalam hal skripsi saya ingin menyampaikan bahwa skripsi ini kami buat dengan mengajukan proposal judul sampai tiga kali kepada dosen pembimbing skripsi saya, yaitu Prof. Dr. Ir. Achmad Soemitro," kata Jokowi di hadapan majelis hakim.

Setelah melalui tiga kali pengajuan, proposal skripsi Jokowi akhirnya disetujui dengan judul "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta". Skripsi lalu diujikan pada 23 Oktober 1985 dengan dua penguji Ir. Sofyan Warsito dan Ir. P. Burhanuddin.

"Saya dinyatakan lulus dengan nilai A, dan kemudian setelah sedikit revisi," ujarnya.

Setelah revisi, Jokowi mencetak skripsinya di Percetakan Perdana. Sementara halaman lainnya dikerjakan menggunakan mesin ketik manual.

"Dengan cover dan lembar pengesahan oleh Percetakan Perdana. Kemudian halaman yang lainnya saya lakukan dengan ketik manual," tuturnya.

Dalam kesaksiannya, Jokowi juga membantah tudingan Roy Suryo dan pihak lainnya mengenai penggunaan jenis huruf Times New Roman pada dokumen skripsi tahun 1985. Menurutnya, penggunaan jenis huruf tersebut bukan hal yang tidak lazim pada masa itu. Ia menyebut ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana juga menggunakan format serupa.

"Kalau dikatakan bahwa covernya pakai Times New Roman yang itu belum ada di tahun 1985, nyatanya ribuan skripsi yang dicetak di Percetakan Perdana itu semuanya juga seperti itu dan bisa. Bukan hanya skripsi saya saja, Yang Mulia," tegas Jokowi.

INTERNASIONAL

Filipina Perlu Memposisikan Diri dengan Tepat, Jangan Biarkan Friksi Bilateral Meluber Menjadi Risiko Kawasan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.46 WIB

Belum lama ini, 22 organisasi bisnis, buruh, dan industri Filipina bersuara bersama untuk mengingatkan Manila: dalam hubungan ekonomi Tiongkok-Filipina, eksposur kepentingan ekonomi Filipina jauh lebih tinggi daripada ketergantungan Tiongkok pada pasar Filipina. Berdasarkan data Badan Statistik Filipina (PSA) semester pertama 2026, Tiongkok dan Hong Kong menyumbang 26,3% dari total ekspor Filipina dan 27% hingga 29,5% dari total impor; gabungan Tiongkok dan Hong Kong mencakup hampir 30% perdagangan internasional Filipina, sementara kontribusi Filipina terhadap total perdagangan global Tiongkok hanya 0,3% hingga 0,5%. Data ini adalah realitas yang harus dihadapi ASEAN secara serius ketika mengamati kebijakan luar negeri dan ekonomi Filipina.Kedua negara belakangan ini terus dilanda friksi akibat sengketa kedaulatan di Laut China Selatan, tetapi hal itu tidak serta-merta saling meniadakan dengan kerja sama ekonomi. Seruan bersama yang diprakarsai Kamar Dagang dan Industri Filipina (PCCI), Federasi Industri Filipina (FPI), Konfederasi Pengusaha Filipina (ECOP), Federasi Eksportir Filipina (Philexport), dan Asosiasi Industri Semikonduktor dan Elektronik Filipina (SEIPI) justru menunjuk pada satu logika pragmatis: sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, energi, dan ritel bergantung pada input industri, mesin, produk elektronik, dan bahan baku strategis dari Tiongkok; transisi energi bersih Filipina yang membutuhkan panel surya, kendaraan listrik, dan teknologi energi terbarukan juga tidak dapat dilepaskan dari rantai pasok Tiongkok. Setiap gangguan ekonomi yang diciptakan melalui konfrontasi terbuka akan pertama-tama menghantam biaya perusahaan, lapangan kerja, dan harga barang konsumen di Filipina.

Kelompok-kelompok bisnis tersebut secara tegas menyerukan penghindaran retorika provokatif, serangan pribadi, dan pernyataan di media sosial, serta meminta posisi resmi disampaikan melalui institusi yang ditunjuk dan saluran diplomatik yang telah ditetapkan. Ini adalah peringatan terhadap "diplomasi melalui media sosial". Jika perbedaan bilateral terus diperbesar oleh Politik domestik, ruang gerak Filipina sendiri akan menyempit, dan dampaknya akan meluber menjadi risiko kawasan. Anggota ASEAN lain juga sama-sama terintegrasi secara mendalam ke dalam jaringan produksi regional bersama Tiongkok; Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Singapura tidak ingin melihat isu Laut China Selatan diolah menjadi pemicu decoupling rantai pasok, penarikan investasi, atau konfrontasi blok. Jika Filipina mengemas sengketa bilateralnya sebagai agenda kolektif ASEAN dan menuntut negara anggota lain memilih pihak, pada dasarnya Filipina membiarkan seluruh kawasan menanggung biaya dari ritme unilateralnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kak Na: PAUD Holistik Integratif Penting untuk Penuhi Kebutuhan Dasar Anak

Oleh Redaksi · 4 Nov, 22.45 WIB

SUBULUSSALAM – Pembinaan Anak Usia Dini yang Holistrik Integratif merupakan sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar anak usia dini secara menyeluruh dan saling terkait. Karena itu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Bunda PAUD Aceh Marlina Usman atau yang akrab disapa Kak Na saat berkunjung ke PAUD-TK Islam Nurul Ahmad, di Desa Sunulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Rabu (4/11/2026).

"Para Bunda-bunda semua merupakan elemen penting bagi upaya kita mewujudkan PAUD yang holistik dan integratif. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami sampaikan atas dedikasi bunda semua untuk anandaananda kita di PAUD," ucap Kak Na.

Kak Na menambahkan, penyelenggaraan PAUD Holistrik Integratif merupakan upaya pemerintah untuk memperhatikan semua aspek kebutuhan anak secara utuh serta memberikan layanan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga medis, keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait.

"Dengan berbagai tugas berat tersebut, maka kerja-kerja ini bukan hanya berada di satuan lembaga PAUD tetapi merupakan kerja besar kita semua, agar target untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas 2045 dapat kita wujudkan," ucapnya.

Untuk itu, Kak Na kembali mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan cita-cita mulia ini.

Dalam sambutannya, Kak Na juga mengingatkan terkait kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang bertujuan untuk memperluas akses serta pemerataan mutu pendidikan dari jenjang prasekolah hingga tingkat menengah, termasuk 1 tahun di PAUD atau TK.

"Pemerintah dengan program Wajib Belajar 13 Tahun, telah memasukkan 1 tahun belajar di PAUD atau TK sebelum anak-anak kita melanjutkan ke jenjang pendidikan dasar dan menengah.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Rocky Gerung Berpantun "Tukang Kayu Sebentar Lagi Jadi Tahanan"

Oleh Redaksi · 5 Nov, 08.37 WIB



BANDA ACEH — Pernyataan satire intelektual Rocky Gerung pada Februari 2026 yang menyebut "Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan" kembali menjadi perbincangan publik menyusul penetapan mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.Dalam forum Public Lecture Series 002 yang digelar Pandu Negeri di Embung Giwangan, Yogyakarta, pada 16 Februari 2026, Rocky Gerung membuka orasinya dengan seloroh tajam: "Tongkat kayu dan batu jadi tanaman… Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan." Ucapan itu memecah tawa sekaligus keheningan audiens yang didominasi mahasiswa dan pelajar. "Tukang kayu" adalah julukan satir yang sudah lama melekat pada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), merujuk pada latar belakang keluarganya yang bergerak di bidang mebel/kayu di Solo.

Saat itu Rocky juga mengkritik alokasi anggaran pendidikan yang dinilainya diselewengkan serta menyinggung warisan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang disebutnya membuat Presiden Prabowo "terendam air kotor hingga sedagu". Rocky kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Prabowo pada 2 Oktober 2026.

Kasus Listyo Sigit dan Jejak Kedekatan dengan Jokowi

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama dua jenderal lainnya — Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso — sebagai tersangka dugaan penyadapan tanpa prosedur (*illegal tapping*), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Sasaran penyadapan meliputi nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh Politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha pada periode 2025–Oktober 2026. Ketiganya kini ditahan di Rutan Bareskrim dan dijerat pasal berlapis KUHP baru serta UU ITE dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara.

Listyo Sigit memiliki jejak kedekatan profesional yang panjang dengan Jokowi. Hubungan mereka bermula pada 2011 di Surakarta, ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo dan Listyo menjabat Kapolresta Surakarta. Setelah Jokowi menjadi presiden, Listyo ditunjuk sebagai ajudan (2014–2016), kemudian menanjak karier hingga menjadi Kapolri pada Januari 2021 atas usulan Jokowi sebagai calon tunggal, sebelum dipindahkan menjadi Kepala KSP di era Prabowo.

Sejumlah Pengamat Politik, termasuk dalam analisis yang beredar, melihat kasus ini sebagai bagian dari dinamika ketegangan antara lingkaran "geng Solo" yang dekat dengan Jokowi dan lingkaran kekuasaan Prabowo.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Hakim Tanyakan Pekerjaan Jokowi, Terungkap di KTP Masih Tertulis Presiden RI

Oleh Redaksi · 5 Nov, 10.33 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bersaksi dalam sidang kasus dugaan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Dalam persidangan, terungkap kolom pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jokowi masih tertulis Presiden Republik Indonesia (RI).

Hal itu terungkap saat Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menanyakan identitas Jokowi sesuai data yang tercantum dalam KTP. Hakim terlebih dahulu mengonfirmasi nama, tempat lahir, hingga tanggal lahir Jokowi.

"Kemudian untuk pekerjaan?" tanya Christina kepada Jokowi.

"Wiraswasta," jawab Jokowi.

Christina kemudian mengonfirmasi kembali jawaban tersebut. Sebab, dalam KTP yang diperlihatkan di persidangan, kolom pekerjaan Jokowi tercantum sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Wiraswasta. Kalau di sini tertulis di KTP sebagai Presiden Republik Indonesia, betul ya?" ucap Hakim Christina.

"Betul, Yang Mulia," jawab Jokowi.

Diketahui, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi terkait tudingan ijazah palsu.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perkara tersebut bermula pada 26 Maret 2025, ketika Jokowi diperlihatkan tiga unggahan di media sosial yang dinilai menyerang kehormatan atau nama baiknya. Unggahan itu terdiri atas dua video di YouTube dan satu unggahan di media sosial X yang pada pokoknya menuding ijazah S-1 Jokowi palsu.

Jaksa menilai Roy menggunakan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis foto ijazah Jokowi. Analisis tersebut, menurut jaksa, dilakukan tanpa verifikasi, konfirmasi, atau izin dari Jokowi selaku pemilik dokumen.

Hasil analisis itu disebut digunakan untuk mendukung tudingan ijazah S-1 Jokowi tidak asli.

Atas perbuatannya, Roy didakwa melanggar Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) KUHP serta ketentuan UU ITE, yakni Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1), sebagaimana disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

ACEH

Wagub Aceh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascabencana

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.07 WIB

BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh T. Robby Irza dan Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh Imran memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wagub Aceh, Rabu (4/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Fadhlullah menyampaikan beberapa hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah kabupaten/kota, meliputi mekanisme percepatan normalisasi sungai, penanganan daerah yang kembali terdampak banjir, serta percepatan penyerapan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam arahannya, dia meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk segera mendata sungai-sungai yang membutuhkan normalisasi. Pendataan tersebut menjadi prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir dan mencegah dampak yang lebih luas di daerah.

Selain itu, Fadhlullah menjelaskan bahwa berdasarkan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, penanganan sungai yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat akan dikoordinasikan agar dapat dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Mekanisme ini serupa dengan penanganan material kayu sisa bencana yang sebelumnya telah dilakukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat melibatkan pihak ketiga untuk melakukan normalisasi dengan tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Data sungai yang disampaikan masing-masing daerah nantinya akan menjadi dasar koordinasi dengan Forkopimda dan aparat penegak hukum, sehingga pelaksanaan pekerjaan memiliki kepastian dan jaminan keamanan.

Selain normalisasi sungai, Fadhlullah juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir untuk segera menetapkan status tanggap darurat bencana apabila diperlukan. Penetapan status ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk mempercepat penanganan bencana serta menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

"Bagi bupati/wali kota yang wilayahnya kembali dilanda banjir dan membutuhkan penanganan segera, silakan menetapkan kembali status tanggap darurat bencana sesuai ketentuan yang berlaku guna mempermudah proses penanganan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota agar mempercepat penyerapan anggaran TKD sehingga dapat segera dimanfaatkan secara optimal untuk pemulihan pasca bencana.

Sementara itu, Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan alat berat, terutama bagi daerah yang mengalami kerusakan parah. Proses pengadaan tersebut, ujar Wagub, saat ini tengah berlangsung di tingkat pusat.

Pada kesempatan itu, Pemerintah kabupaten/kota turut melaporkan perkembangan penanganan pasca bencana di daerah masing-masing sekaligus menyampaikan berbagai kebutuhan dan …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Update Banjir Aceh, Ribuan Rumah Terdampak dan Ratusan Warga Mengungsi

Oleh Van · 4 Nov, 21.49 WIB

BANDA ACEH — Banjir yang melanda sejumlah wilayah Aceh masih berdampak pada permukiman warga hingga Rabu, 4 November 2026.

Sebanyak 2.255 rumah di Subulussalam terdampak, sementara ratusan warga Aceh Selatan mengungsi.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan BPBD setempat pada Selasa, 3 November 2026, banjir dipicu hujan deras dan luapan sungai di sejumlah daerah.

2.255 Rumah di Subulussalam Terdampak

Banjir di Kota Subulussalam berdampak pada 23 desa yang tersebar di tiga kecamatan. Selain rumah warga, jalan desa, lahan pertanian, sekolah, dan tempat ibadah turut terendam.

Kepala Pelaksana BPBA Bahron Bakti menyampaikan, "dampak material 2.255 unit rumah, lalu jalan desa, lahan dan kebun pertanian, sekolah serta tempat ibadah terendam banjir," dalam laporan yang disampaikan di Banda Aceh, Selasa.

Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi sejak Sabtu, 24 Oktober 2026, memicu luapan Sungai Lae Souraya dan Sungai Rikit.

Sebanyak 32 kepala keluarga dilaporkan mengungsi. Air mulai surut di sejumlah titik Kecamatan Sultan Daulat, tetapi permukiman di Kecamatan Rundeng dan Longkib masih tergenang.

Ratusan Warga Aceh Selatan Mengungsi

Di Kabupaten Aceh Selatan, banjir melanda tiga gampong di Kecamatan Trumon dan Trumon Tengah. Data BPBA mencatat 794 jiwa dari 222 kepala keluarga terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Aceh Selatan Mudatsir mengatakan, "Banjir di kawasan Trumon Raya terus meluas. Jumlah warga yang mengungsi tercatat mencapai 205 jiwa. Sedangkan warga terdampak sebanyak 794 jiwa."

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Bawa Ijazah Asli ke Pengadilan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 10.29 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026 untuk menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo.

Jokowi datang didampingi kedua anaknya, Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu. Ketiganya tiba menggunakan mobil yang sama. Mengenakan batik bernuansa cokelat dan songkok hitam, Jokowi memastikan telah membawa dokumen yang diperlukan untuk memberikan kesaksian, termasuk ijazah asli yang selama ini menjadi pokok polemik.

"Bawa," singkat Jokowi kepada awak media.

Kehadiran Jokowi di PN Jaktim mendapat pengamanan ketat. Sebanyak 6.770 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya persidangan di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal sebelumnya mengatakan, ribuan personel tersebut terdiri dari 1.200 anggota TNI dan 5.570 personel Polri. Pengamanan dibagi dalam tiga ring untuk mengantisipasi potensi gangguan serta memastikan persidangan berjalan tertib dan kondusif.

Di ring dua, aparat menyiapkan empat sektor dengan kuota 200 orang. Jumlah tersebut dibagi untuk masing-masing kubu, yakni 100 pendukung Projo dan 100 pendukung Roy Suryo bersama Rismon Hasiholan Sianipar dan pihak terkait lainnya.

Sementara untuk memasuki ruang sidang utama, hanya 80 pendukung yang diperbolehkan masuk. Masing-masing kubu mendapat jatah 40 orang.

Sebelumnya, Kepala PN Jakarta Timur Efendi menegaskan persidangan tetap terbuka untuk umum. Namun, jumlah pengunjung dibatasi menyesuaikan kapasitas ruang sidang yang hanya mampu menampung 80 orang. Pihak pengadilan juga menyiapkan fasilitas televisi di luar ruang sidang agar masyarakat tetap dapat mengikuti jalannya persidangan.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik atas tudingan ijazah palsu Jokowi. Jaksa penuntut umum mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dalam dakwaan subsidair, Roy juga dijerat Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

NASIONAL

Jokowi Jamin Foto di Ijazah S1 Benar-Benar Dirinya: Buat Apa Pasang Foto Dumatno?

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.25 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan foto orang yang ada di dalam ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan dirinya. Dia menepis anggapan bahwa foto yang ada di ijazah itu merupakan saudara jauhnya, Dumatno Budi Utomo.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang lanjutan kasus dugaan tudingan ijazah palsu untuk terdakwa Roy Suryo yang digelar di PN Jaktim, Kamis (5/11/2026).

"Foto saya Yang Mulia. Untuk apa dipasang fotonya Dumatno Budi Utomo," ujar Jokowi dalam persidangan.

Lantas, jaksa bertanya pengetahuan Jokowi terkait ijazahnya dijadikan objek penelitian oleh Roy Suryo cs. "Tidak tahu Yang Mulia," ucapnya.

Kemudian, jaksa menanyakan apakah Roy Suryo cs pernah meminta izin untuk menjadikan ijazahnya sebagai objek penelitian.

"Tidak Yang Mulia, hanya pada saat itu ada rombongan datang ke rumah saya dengan bus, demo. Kemudian saya suruh masuk tiga orang, dan beliau-beliau meminta saya untuk menunjukkan ijazah yang asli yang saya miliki," ucap Jokowi.

"Saya sampaikan, Bapak Ibu tidak memiliki otoritas untuk itu, jadi saya tidak tunjukkan Yang Mulia. Saya sampaikan, saya akan tunjukan kalau diminta oleh kepolisian, kejaksaan dan oleh pengadilan Yang Mulia," katanya.

Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi berharap ijazah yang ditampilkan tersebut dapat mengakhiri fitnah terhadap kliennya.

"Kami berharap kehadiran Pak Jokowi di forum terhormat di hadapan Yang Mulia majelis hakim ini dapat mengakhiri fitnah yang telah terus menerus dilakukan oleh berbagai pihak mengenai status ijazah Pak Jokowi, sehingga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi Pak Jokowi sebagai rakyat biasa yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum," kata tim kuasa hukum Jokowi dalam keterangannya

NASIONAL

Refly Harun Kaitkan Kasus Listyo Sigit dengan Desakan Uji Ulang Ijazah Jokowi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.41 WIB



BANDA ACEH -Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menyinggung penangkapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat mempertanyakan independensi pengujian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Yang namanya pengujian lab kemarin, kami duga tidak independen. Terbukti apa? Terbukti dari ditangkapnya Listyo Sigit Prabowo yang tidak lain adalah orang dekat Jokowi," kata Refly di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis, 5 November 2026.

Atas dasar itu, pihaknya meminta agar ijazah yang diperlihatkan dalam persidangan diperiksa kembali melalui mekanisme pengujian independen.

"Kami meminta agar ada pengujian yang baru, pengujian independen," tegasnya.

Refly juga menilai, penunjukan dokumen di hadapan pengunjung sidang tidak serta-merta menjawab perdebatan mengenai keaslian ijazah tersebut.

"Kalau hanya ditunjukkan itu hanya show of force saja. Apakah kalian bisa mengerti apakah itu asli atau palsu hanya dengan ditunjukkan, kan tidak bisa," ujarnya.

Ia bahkan mengklaim ijazah yang diperlihatkan Jokowi dalam persidangan berbeda dengan dokumen yang sebelumnya ditunjukkan Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025.

"Kami 'haqqul yakin' ijazah yang ditunjukkan hari ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025," ungkapnya.

NASIONAL

Pelaku Makar Bisa Dihukum Mati

Oleh Redaksi · 5 Nov, 10.26 WIB



BANDA ACEH -Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus diusut hingga tuntas.

Menurut Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, munculnya berbagai dugaan dan spekulasi di tengah masyarakat harus dijawab melalui proses hukum yang transparan. Apalagi, penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh penting bukan perkara yang bisa dianggap sepele.

"Banyak masyarakat menduga-duga dan harus dicari tahu. Tidak mungkin menyadap Presiden dan tokoh cuma iseng. Berbagai komentar ahli juga mengatakan ada yang memesan hasil sadapan. Agar tidak menjadi bola liar, harus diusut tuntas," kata Mardani, Kamis, 5 November 2026.

Mardani menegaskan, perkara ini semakin serius karena muncul dugaan adanya motif yang lebih besar di balik aktivitas penyadapan tersebut. Karena itu, aparat penegak hukum harus menelusuri siapa yang merancang, memerintahkan hingga menerima dan memanfaatkan hasil penyadapan.

Ia juga mengingatkan bahwa makar merupakan perbuatan yang sangat serius. Bahkan, Pasal 191 KUHP baru mengatur ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati, terhadap tindak pidana makar dengan maksud tertentu terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

"Makar itu perbuatan sangat serius. Pasal 191 di KUHP baru bahkan makar pada Presiden bisa diancam hukuman mati," ujarnya.

Mardani mengibaratkan pengusutan kasus ini seperti menangani penyakit kanker yang harus dicari hingga ke sumbernya. Penanganan yang hanya menyasar pelaku di lapangan dikhawatirkan tidak menjawab persoalan utama.

"Seperti kanker, harus diusut sampai ke akarnya. Lalu temukan siapa master mind-nya. Jangan berhenti pada pelaku di lapangan," tandasnya.

NASIONAL

PAPD: Ungkap Aktor Intelektual Penyadapan Presiden

Oleh Redaksi · 5 Nov, 06.56 WIB



BANDA ACEH -Direktur Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD), Agus Rihat P. Manalu, mendesak pengusutan secara menyeluruh terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet, serta sejumlah tokoh nasional.

Rihat menilai perkara ini merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan negara, perlindungan komunikasi pejabat negara, supremasi hukum, dan integritas institusi pemerintahan.

Menurutnya, apabila benar terdapat penyalahgunaan sistem penyadapan negara untuk kepentingan di luar penegakan hukum, maka hal tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang tidak boleh ditoleransi.

"Persoalan ini tidak boleh berhenti pada siapa yang memasukkan nomor telepon ke dalam sistem penyadapan. Publik harus mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang mengendalikan, siapa yang menggunakan, dan siapa yang menerima hasil penyadapan tersebut. Kita harus mengungkap sampai ke akar-akarnya," kata Rihat melalui keterangan tertulis, Kamis 5 November 2026.

PAPD memandang bahwa dugaan penyadapan terhadap Presiden dan jajaran kabinet bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur administrasi institusi.

Apabila terbukti dilakukan secara ilegal dan terorganisasi, tindakan tersebut dapat membuka kemungkinan adanya penyalahgunaan instrumen negara untuk kepentingan kelompok tertentu.

Rihat mempertanyakan apakah perangkat dan kewenangan institusi negara telah digunakan untuk mengawasi pusat pemerintahan di luar mekanisme hukum yang sah.

"Jangan sampai ada negara di dalam negara. Institusi yang memiliki kewenangan dan fasilitas penyadapan harus tunduk kepada konstitusi dan undang-undang, bukan menjadi alat kepentingan pribadi, kelompok, ataupun jaringan kekuasaan tertentu," kata Rihat.

Terkait penetapan Listyo Sigit Prabowo bersama beberapa perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, PAPD meminta proses hukum dilakukan secara independen dan transparan.

Rihat menegaskan bahwa jabatan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi penghalang bagi penegakan hukum.

Apabila seluruh dugaan tersebut terbukti melalui proses pembuktian yang sah, para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi hukuman maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan.

PAPD menilai pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab penyidik adalah siapa pihak yang menggunakan dan menerima informasi hasil penyadapan.

Rihat meminta penyidik tidak hanya mengungkap pelaksana teknis, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual dan pihak yang memperoleh keuntungan dari informasi tersebut.

"Jangan hanya mengungkap siapa yang menyadap. Ungkap juga siapa yang menikmati hasil sadapan. Siapa yang menggunakan informasi tersebut dan untuk kepentingan siapa?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Ditanya Riwayat Pendidikan Malah Kritik Roy Suryo, Jokowi Langsung Ditegur Hakim

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.21 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sempat mendapat teguran dari hakim ketua Christina Endarwati saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan fitnah ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma.

Momen itu terjadi ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Jokowi menjelaskan riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Namun, alih-alih langsung menjawab, Jokowi justru menyinggung Roy Suryo yang selama ini mempersoalkan ijazahnya.

"Terima kasih Bapak Jaksa, yang terhormat Bapak Roy Suryo sebagai peneliti, untuk saya bukan peneliti. Peneliti etikanya bukan seperti ini. Datang ke UGM membawa satu rombongan..." ujar Jokowi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026.

Pernyataan Jokowi langsung dipotong hakim ketua Christina Endarwati. Hakim meminta saksi menjawab pertanyaan sesuai pokok perkara dan tidak menyampaikan komentar di luar pertanyaan.

"Mohon dijawab saja terkait pertanyaannya, bukan komentar seperti yang disampaikan. Pertanyaannya bisa diulang," tegas Christina.

JPU kemudian kembali memperjelas pertanyaan dengan meminta Jokowi menyebutkan riwayat pendidikan, termasuk jenjang S1.

"Oh, S1 yang mulia," jawab Jokowi.

JPU lantas mengulangi pertanyaan mengenai riwayat pendidikan Jokowi dari SD hingga perguruan tinggi.

Jokowi akhirnya menjawab bahwa dirinya mengawali pendidikan di SDN 111 Kota Surakarta, kemudian SMPN 1 Kota Surakarta dan SMA Negeri 6 Kota Surakarta.

Setelah lulus SMA, Jokowi melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Terima kasih Bapak Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati. Jadi dimulai dari SD, SD saya di SDN 111 Kota Surakarta, SMPN 1 Kota Surakarta, SMA N 6 Kota Surakarta, kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia," tutur Jokowi

NASIONAL

Jokowi Didampingi 2 Anaknya, Kaesang dan Kahiyang Temani Sang Ayah di Sidang Ijazah

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.37 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk bersaksi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tiffauzia Tyasuma atau Dokter Tifa, Kamis (5/11/2026) hari ini.

Jokowi turut didampingi dua anaknya yakni Kaesang Pangarep dan Kahiyang Ayu.

Selain itu, kedatangan Jokowi disambut para simpatisannya yang sudah hadir sejak pagi di area gedung PN Jakarta Timur.

Jokowi mengaku turut membawa ijazah dan dokumen lainnya ke PN Jaktim.

"Bawa," kata Jokowi setibanya di PN Jaktim, Kamis (5/11/2026).

Jokowi juga membawa sejumlah dokumen lainnya. "Semua, semua," katanya

SPORT

Dari Timnas hingga Liga Eropa, Begini Cara Suporter Indonesia Menikmati Sepak Bola

Oleh Redaksi · 4 Nov, 16.25 WIB

Sabtu sore masih bahas klub kota sendiri. Tengah malam, alarm dipasang buat nonton Liga Inggris. Begitu Timnas Indonesia main, teman yang biasanya cuma baca grup WhatsApp ikut nimbrung dan sudah punya usulan starting XI. Tiga suasana itu bisa datang dari grup yang sama, bahkan dari orang yang sama.Sepak bola di Indonesia punya banyak pintu masuk. Ada yang pertama kali kenal bola karena diajak keluarga ke stadion. Ada yang hafal nama pemain Eropa dari gim sebelum pernah menonton satu pertandingan penuh. Ada juga yang baru mulai ikut nonton karena penasaran kenapa teman-temannya selalu ramai setiap Timnas main. Dari mana pun mulainya, selalu ada klub, pemain, atau pertandingan yang bikin seseorang betah ikut ngobrol.

Di liga domestik, dua teman bisa menghabiskan akhir pekan saling ledek karena mendukung klub yang berbeda. Saat Timnas main, keduanya bisa duduk di meja yang sama dan sama-sama teriak ketika bola masuk ke kotak penalti lawan. Selera mereka soal pemain tetap berbeda. Yang satu ingin Garuda lebih berani menekan, sementara yang lain sudah puas kalau lini belakang rapi dan tim bisa keluar dari tekanan.Obrolannya juga sering berlanjut setelah pertandingan. Seorang pemain yang menarik perhatian bersama Timnas bisa bikin orang penasaran dengan perannya di klub. Di skuad Garuda ia mungkin lebih sering diminta menjaga posisi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

NASIONAL

Jokowi Bawa Ijazah ke PN Jaktim, Bakal Perlihatkan di Hadapan Roy Suryo

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.29 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengaku turut membawa ijazah dan dokumen lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jokowi akan bersaksi dalam sidang kasus tudingan ijazah palsu untuk terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa.

"Bawa," kata Jokowi setibanya di PN Jaktim, Kamis (5/11/2026).

Jokowi pun mengaku turut membawa sejumlah dokumen lainnya. "Semua, semua," katanya.

Jokowi sebelumnya tiba sekitar pukul 08.30 WIB. Dia turun dari mobil Toyota Innova yang ditumpanginya di depan gerbang PN Jaktim. Setelah itu, Jokowi berjalan kaki memasuki area pengadilan.

Mengenakan peci hitam, kemeja batik dan celana hitam, Jokowi tampak tersenyum saat disambut para pendukungnya. Mereka mengerumuninya sembari meneriakkan dukungan.

"Semangat pak, kebenaran pasti menang," ujar salah satu pendukung Jokowi

NASIONAL

Momen Jokowi Perlihatkan Ijazah S1 UGM di Sidang, Roy Suryo Tertawa

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.29 WIB



BANDA ACEH - - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memperlihatkan ijazah sarjana (S1) Universitas Gadjah Mada (UGM) saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Dokumen tersebut ditunjukkan dalam persidangan kasus dugaan fitnah terkait ijazah Jokowi yang menjerat Roy Suryo sebagai terdakwa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi mengangkat ijazah tersebut menggunakan kedua tangannya untuk diperlihatkan kepada majelis hakim dan hadirin sidang.

Sementara itu, Roy Suryo yang berdiri di dekatnya tampak tertawa.

Dalam persidangan, Jokowi sebelumnya memaparkan riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dia menyebut pernah menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan UGM.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat menanyakan jurusan yang diambil Jokowi selama kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Menanggapi pertanyaan itu, Jokowi menjelaskan bahwa saat dirinya masuk, tak ada istilah jurusan tetapi lebih ke mata kuliah pilihan, meski bisa dianggap jurusan.

"Yang Mulia, jadi di Fakultas Kehutanan itu sejak saya masuk tidak ada yang namanya jurusan, tidak ada. Tetapi kami para mahasiswa itu diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan," jawab Jokowi.

"Di situlah kami ada yang menyebut, 'oh kamu di jurusan teknologi kayu atau teknologi hasil hutan. Kamu ada di jurusan silvikultur. Kamu ada di jurusan ekonomi kehutanan. Oh kamu ada di jurusan konservasi hutan'. Hanya seperti itu," imbuhnya.

Jokowi pun mengaku banyak mengambil mata kuliah pilihan di bidang teknologi hasil hutan atau teknologi kayu, seperti mata kuliah struktur dan sifat kayu, pengeringan kayu, pengawetan kayu, pulp dan kertas, industri kayu lapis, serta mata kuliah penggergajian

NASIONAL

Jokowi Mengaku Dihina dan Direndahkan, Nama Baik Keluarga Ikut Tercemar

Oleh Redaksi · 5 Nov, 12.01 WIB



BANDA ACEH - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku merasa terhina dan direndahkan, akibat tindakan para terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait polemik ijazahnya. Jokowi menyebut, peristiwa tersebut juga berdampak pada nama baik dirinya dan keluarga.Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan kesaksian dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim). Saat ditanya jaksa penuntut umum (JPU) mengenai kerugian yang dialaminya setelah menyaksikan video yang menampilkan perbuatan para terdakwa, Jokowi mengaku mengalami kerugian immateriil.

"Kerugian immaterial, Yang Mulia. Kerugian immaterial karena tercemarnya nama baik saya dan juga keluarga saya," ujar Jokowi di persidangan.

Selain merasa nama baiknya tercemar, Jokowi mengaku mendapat perlakuan yang membuat dirinya merasa dihina dan direndahkan.

"Saya juga merasa telah dihina, direndahkan dengan amat sangat," katanya.

Jokowi juga mengungkapkan keberatannya atas tuduhan menggunakan ijazah palsu untuk kepentingan pencalonan dalam sejumlah kontestasi Politik. Ia menyebut tuduhan tersebut berkaitan dengan pencalonannya sebagai wali kota sebanyak dua kali, gubernur satu kali, hingga presiden dua kali.

"Kemudian yang ketiga juga saya merasa dituduh menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan diri sebagai wali kota dua kali, gubernur sekali, dan presiden dua kali, Yang Mulia," pungkasnya.

NASIONAL

Soroti Fisik hingga Kualitas Foto, Tim Hukum Roy Suryo Sebut Ijazah Jokowi Berbeda dengan Dokumen 15 Desember

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.17 WIB



BANDA ACEH - Kubu Roy Suryo mempertanyakan perbedaan dokumen ijazah yang ditunjukkan oleh Joko Widodo (Jokowi) dalam persidangan.

Pihak Roy Suryo menilai terdapat kejanggalan dan perbedaan antara dokumen yang diperlihatkan saat sidang dengan berkas atau dokumen yang sempat dilihat sebelumnya pada 15 Desember.

Dalam keterangan kepada awak media usai persidangan, kuasa hukum beserta Roy Suryo menyoroti sejumlah detail fisik pada dokumen tersebut, mulai dari kondisi fisik kertas, cetakan watermark, hingga kualitas foto yang tersemat pada berkas.

Menurut mereka, terdapat perbedaan ketajaman serta kesan penggunaan foto baru pada dokumen yang dihadirkan di persidangan.

Selain menyoroti perbedaan fisik dokumen, tim kuasa hukum juga mempersoalkan argumen hukum terkait tuduhan pencemaran nama baik. Mereka menilai pihak pelapor belum dapat membuktikan secara pasti apakah pihak terlapor benar-benar mengetahui keaslian dokumen pembanding sejak awal sebelum menyampaikan analisis secara ilmiah.

Pihak Roy Suryo menegaskan bahwa proses persidangan ini masih berada pada tahap awal. Mereka menyatakan akan terus menguji keabsahan dokumen tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan detail dan mendalam pada agenda persidangan lanjutan berikutnya

NASIONAL

Bongkar Fakta di Persidangan, Jokowi Sebut Sosok Dumatno Budi Utomo Masih Anak-Anak Saat Dirinya Lulus

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.30 WIB



BANDA ACEH - Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa tersinggungnya di persidangan setelah dituduh menggunakan foto orang lain berinisial Dumatno Budi Utomo pada dokumen ijazahnya.

Ia menilai tudingan tersebut sangat tidak masuk akal mengingat usia yang bersangkutan saat itu masih sangat belia.

Dalam persidangan yang digelar, Joko Widodo memberikan tanggapan tegas terkait materi video yang dipersoalkan dalam dakwaan. Dirinya mempertanyakan logika dari tudingan yang menyebutkan bahwa ijazah miliknya menggunakan foto sepupu jauhnya tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sosok yang dikaitkan dalam tudingan tersebut merupakan kerabat jauh yang lahir pada tahun sembilan belas tujuh puluh tujuh. Menurut perhitungannya, pada saat ia menyelesaikan pendidikan, usia yang bersangkutan baru menginjak delapan tahun sehingga tuduhan penggantian foto dinilai tidak logis.

Di hadapan majelis hakim, ia juga menegaskan rekam jejak kepemimpinan yang pernah diembannya mulai dari tingkat walikota, gubernur, hingga presiden yang telah melalui proses verifikasi dan seleksi ketat tanpa ada permasalahan administratif sejak awal.

Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti digital serta pemutaran rekaman video yang diajukan oleh pihak penuntut umum

NASIONAL

Wapres Gibran Tak Ikut Disadap, Sapma PP Jakarta: Publik Tidak Bodoh

Oleh Redaksi · 5 Nov, 07.00 WIB



BANDA ACEH -Pengurus Wilayah Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (PW Sapma PP) DKI Jakarta mengecam keras dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kasus penyadapan tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

"Ini adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang sangat telanjang dan brutal," kata Ketua PW SAPMA PP DKI Jakarta, Johanes Geraldy Purba dalam keterangannya pada Rabu, 4 November 2026.

Gerald juga menyoroti dugaan penggunaan perangkat Lawful Interception Management System (LIMS) dalam praktik penyadapan.

"Kami mencium aroma busuk skenario Politik, publik tidak bodoh. Kenapa Presiden, para menteri, hingga pengusaha disadap, tetapi nama Wakil Presiden sama sekali tidak ada di dalam daftar target? Ada apa ini?" kata Gerald.

Dalam kasus ini, Sapma PP DKI Jakarta menyampaikan empat tuntutan. Pertama, mendesak agar seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari aktor intelektual, penyandang dana, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari data penyadapan, diusut tanpa pandang bulu.

Kedua, meminta para pelaku dijatuhi hukuman pidana maksimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga, mendesak pemerintah, DPR, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan audit.

Keempat, mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh kader organisasi untuk kawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.

NASIONAL

Sidang Roy Suryo dan Tifa, Massa Pendukung Jokowi Padati Area PN Jaktim

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.33 WIB



BANDA ACEH - Massa pendukung Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjelang persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jokowi dijadwalkan hadir sebagai saksi. Sejumlah pendukung Jokowi tampak membawa spanduk berisi dukungan kepada mantan Presiden RI tersebut.

Para pendukung Jokowi terlihat mengenakan pakaian serba putih dengan ikat kepala berwarna merah putih.

Sebagian massa sempat berupaya masuk ke area PN Jakarta Timur. Namun, mereka masih tertahan di pintu gerbang karena petugas membatasi akses masuk ke lingkungan pengadilan.

Selain itu, massa pendukung Jokowi terpantau berada di sepanjang jalan menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Polisi lalu bersiap memasang blokade untuk menghalau massa agar tidak memasuki area pengadilan.

Sejumlah layar dan pengeras suara telah disediakan di beberapa titik di luar area pengadilan. Fasilitas tersebut disiapkan agar masyarakat tetap dapat memantau jalannya persidangan. Kursi-kursi juga disediakan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan persidangan dari luar ruang ruang sidang.

Sementara itu, personel Brimob dilengkapi tameng disiagakan untuk mengamankan jalannya persidangan. Sejumlah kendaraan taktis juga terparkir di sepanjang Jalan Dr Sumarno atau sekitar pengadilan

NASIONAL

Dokter Tifa Siapkan 300 Pertanyaan untuk Jokowi

Oleh Redaksi · 5 Nov, 06.53 WIB



BANDA ACEH -Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi dijadwalkan memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah pada Kamis, 5 November 2026.

Terdakwa kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa mempertanyakan apakah Jokowi jadi hadir pada sidang 5 November 2026. Ia menggunakan nama Purwoko untuk menyentil Jokowi.

"Pak Purwoko mau datang ngga besok ke PN Jaktim?" tulis Dokter Tifa melalui akun X pribadinya.

Dokter Tifa mengaku sudah menyiapkan 55 video untuk diputar di ruang sidang, serta siap memberondong Jokowi dengan 300 ratusan pertanyaan.

"Jadi sekalian kita bongkar semua dari beliau lahir sampai katanya mahasiswa lalu sampai kerja lalu sampai jadi walikota, gubernur, dan Presiden," kata Dokter Tifa.

"Pertanyaan saya ngga melulu soal Ijazah, tetapi mengikuti BAP nya dan barang bukti yang jumlahnya ada 923 jenis," sambungnya.

Dengan materi 55 video dan 300 pertanyaan, Dokter Tifa memperkirakan sidang bisa rampung hingga bada Isya.

"Saya lagi siapin outfit buat dipake besok sama sepatu. Mau ketemu Mantan Presiden harus tampil imut dan cakep, dong," pungkas Dokter Tifa.

NASIONAL

Suket SMA Gibran yang Dibatalkan MA Bisa Diajukan Ulang

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.18 WIB



BANDA ACEH -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih memiliki peluang untuk mengajukan ulang permohonan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan luar negeri setelah surat sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Pakar hukum Deny Hariyatna menilai putusan MA yang membatalkan suket penyetaraan, tidak serta-merta menghilangkan hak Gibran untuk mengajukan permohonan penyetaraan pendidikan.

“Bisa diajukan yang baru dengan persyaratan lebih lengkap,” kata Deny dalam keterangannya Rabu, 4 November 2026.

Menurut Deny, penyetaraan ulang adalah opsi yang dapat ditempuh. Namun saat mengajukan suket, dokumen pendidikan yang diperlukan sudah lengkap dan memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Hal tersebut merujuk UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta aturan pelaksana mengenai penyetaraan pendidikan luar negeri.

Deny menilai pembenahan dokumen dan pengajuan permohonan baru lebih relevan untuk dipertimbangkan dibandingkan langsung menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).

“Hak upaya hukum luar biasa (PK) itu melekat pada Dikdasmen, bukan pada Wapres Gibran,” tutup Deny.

ISLAM

Bencana: Keuntungan Bagi Para Koruptor

Oleh Ria Nurvika · 4 Nov, 14.35 WIB

Oleh: Ria Nurvika Ginting,S.H., M.H

ARA kebakaran di Kalimantan semakin hari semakin menyebar keseluruh penjuru.

Aktivitas masyarakat terdampak menjadi terganggu, udara menjadi menguning, asap bagai kabut yang tak kunjung usai hingga membatasi jangkau pandang yang akhirnya menyebabkan petaka di jalan-jalan umum.

Transportasi menjadi terganggu tetapi aktivitas keluar rumah tetap harus berjalan untuk menyambung hidup.

Sungguh, pemandangan yang sangat mengiris dan melukai hati.

Di tengah kondisi seperti ini, ternyata masih ada orang-orang yang menjadikannya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Bima Setiawan, staf ahli di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam pemanfaatan anggaran bencana banjir di Aceh dan Sumatera hingga pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dan Papua untuk keuntungan pribadi.

Kasus korupsi dana bantuan bencana bukan baru kali ini terjadi. Hal ini berulang terjadi.

Bencana dijadikan kesempatan menuai keuntungan oleh pihak-pihak yang menjadikan bencana sebagai ladang korupsinya.

Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi korban bencana alam malah diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku koruptor.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id
Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

9 BERITA

ACEH

Wali Kota Sabang Dorong Perluasan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.58 WIB



SABANG – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal menjadi perhatian Pemerintah Kota Sabang.

Wali Kota Sabang mendorong penambahan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar semakin banyak pekerja mendapatkan perlindungan saat menghadapi risiko kerja maupun kematian.

Hal tersebut dibahas dalam audiensi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat bersama Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di Ruang Rapat Wali Kota Sabang, Kamis (5/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menekankan pentingnya meningkatkan jumlah pekerja yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah manfaat Jaminan Kematian (JKM), yang memberikan santunan hingga Rp42 juta bagi peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, sesuai ketentuan yang berlaku.

Zulkifli mengatakan, selama ini Pemko Sabang memberikan santunan sebesar Rp5 juta kepada keluarga warga yang meninggal dunia. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat.

“Selama ini Pemerintah Kota Sabang memberikan santunan Rp5 juta kepada warga yang meninggal dunia. Namun, melalui BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat yang terdaftar bisa mendapatkan santunan hingga Rp42 juta. Ini tentu perbedaan yang cukup jauh,” ujarnya.

Zulkifli berharap semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja informal, dapat memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan ini. Karena itu, penting bagi para pekerja untuk memahami manfaat BPJS Ketenagakerjaan agar mereka memiliki jaminan ketika menghadapi risiko yang tidak kita harapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Saiful Hidayat menyampaikan bahwa kunjungannya ke Sabang bertujuan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja, terutama sektor informal seperti nelayan.

Menurutnya, upaya tersebut juga dapat melibatkan perusahaan melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pembiayaan perlindungan pekerja tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.

“Kami ingin memperkuat kolaborasi agar perlindungan bagi para pekerja semakin luas, khususnya pekerja informal dan nelayan. Perusahaan juga bisa berperan melalui dana CSR untuk melindungi pekerja informal di lingkungan sekitarnya, sehingga tidak semuanya harus menggunakan dana APBD,” kata Saiful.

Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai manfaat perlindungan, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Kader PKK Aceh Didorong Aktif Berkoordinasi dengan Pemangku Kebijakan

Oleh Redaksi · 4 Nov, 15.48 WIB

SINGKIL – Para pemangku kebijakan di daerah adalah orang yang paling mengerti kondisi daerahnya. Karena itu, kader PKK harus aktif berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di wilayah masing-masing, karena ini menjadi kunci bagi suksesnya program pembangunan dan pembenahan kehidupan sosial yang merata.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TP PKK Aceh Marlina Usman, usai melakukan pembinaan dan penilaian Gampong Mawaddah Warahmah di Kantor TP PKK Desa Gosong Telaga Selatan, Kecamatan Singkil Utara, Selasa (3/11/2026).

“Kader PKK merupakan garda terdepan organisasi ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dengan 10 Program Pokok PKK, kita dituntut untuk terus bersinergi dan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di daerah secara bertahap dan berjenjang untuk menyukseskan berbagai program dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera” ujar Marlina.

“Tanpa koordinasi yang baik, maka semua kerja-kerja kader akan sia-sia. Ingat, tanpa koordinasi maka Ketua TP PKK Pusat tidak mengetahui kendala PKK di tingkat provinsi. Demikian juga TP PKK Aceh tentu tidak mengetahui permasalahan dan kendala di tingkat kabupaten dan kota demikian seterusnya hingga tingkat kecamatan dan gampong,” ucapnya.

Oleh karena itu, Marlina menyarankan para kader untuk selalu aktif berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan secara berjenjang.

“PKK Gampong bersama Geuchiek melapor ke kecamatan, camat melapor ke Bupati, bupati melapor ke Gubernur dan PKK Aceh, jika kendala tersebut tidak juga bisa ditanggulangi di Pemerintah Aceh, maka kami akan meminta bantuan ke Pemerintah Pusat, ke PKK Pusat,” katanya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wali Nanggroe Terima Menko Yusril, Bahas Kekhususan Aceh dan Penyelesaian Isu Bendera

Oleh Redaksi · 5 Nov, 19.37 WIB



BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh, Tgk. Malik Mahmud Al-Haythar, menerima kunjungan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, beserta istri dan delegasi, dalam jamuan makan malam di Meuligoe Wali Nanggroe, Rabu (4/11/2026) malam. Pertemuan tersebut membahas penguatan kekhususan Aceh, keberlanjutan perdamaian, serta penyelesaian isu Bendera Aceh.

Usai pertemuan, Yusril mengatakan bahwa sejumlah hal yang disampaikan Wali Nanggroe, terutama terkait bendera Aceh, akan ia teruskan langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

“Kami berdiskusi panjang lebar. Ada hal-hal yang disampaikan oleh Wali Nanggroe kepada saya, yang harus saya sampaikan kepada Presiden, terutama terkait bendera Aceh khususnya,” ujar Yusril.

Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bagian dari komunikasi konstruktif antara Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga-lembaga kekhususan Aceh.

Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menegaskan pentingnya menjaga perdamaian Aceh yang telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa melalui penghormatan terhadap kesepakatan damai, kepastian hukum, dan hubungan yang saling menghormati antara Aceh dan pemerintah pusat.

“Yang kami harapkan bukan perlakuan istimewa di luar hukum, melainkan kepastian pelaksanaan kekhususan Aceh yang telah disepakati dalam perdamaian dan diakui dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia,” kata Wali Nanggroe.

Penyelesaian Isu Bendera Aceh

Isu Bendera Aceh, yang pengaturannya telah dituangkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, menjadi salah satu pokok bahasan utama.

Lembaga Wali Nanggroe memandang persoalan ini perlu diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum yang tepat, dengan memperhatikan kekhususan Aceh, peraturan perundang-undangan nasional, serta semangat perdamaian.

Selain soal bendera, pertemuan juga menegaskan pentingnya pelaksanaan kekhususan Aceh secara konsisten sesuai Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua landasan tersebut menjadi pijakan penyelenggaraan pemerintahan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wali Nanggroe berharap komunikasi dan dialog kelembagaan dengan pemerintah pusat terus diperkuat dan menghasilkan langkah-langkah konstruktif bagi kepentingan masyarakat Aceh.

Ucapan Selamat atas Gelar Doktor Kehormatan

Pada kesempatan yang sama, Wali Nanggroe menyampaikan ucapan selamat kepada Yusril atas rencana penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) oleh Universitas Islam Negeri …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub Aceh Perkuat Koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana

Oleh Redaksi · 4 Nov, 18.07 WIB

BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh T. Robby Irza dan Ketua Tim Satgas PRRP Wilayah Aceh Imran memimpin rapat percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana yang diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota se-Aceh secara virtual, di Ruang Rapat Wagub Aceh, Rabu (4/11/2026).

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Seluruh OPD Aceh Barat Didorong Terintegrasi dalam Satu Data

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 20.04 WIB



Pemkab Aceh Barat menggelar Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2026,FOTO/HAI

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat tata kelola data pembangunan daerah melalui Forum Satu Data Indonesia (SDI) tingkat kabupaten tahun 2026. Forum yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut digelar di Aula Pocut Baren, Setdakab Aceh Barat, Kamis (5/11/26).

Kegiatan dibuka oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Wistha Nowar, didampingi Kepala Bapperida Abdul Wahab, Kepala BPS Rochadi, serta Kepala Diskominsa Dedi Mulianda.

Forum ini bertujuan memperkuat integrasi data pembangunan agar lebih akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah dokumen penting melalui penandatanganan berita acara, meliputi Kesepakatan Daftar Data 2027, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Aceh Barat 2025–2029, Manajemen Hak Akses Data, Pemeriksaan Data, serta Penggunaan Data Tunggal melalui Portal SATURASI.

Wistha Nowar mengatakan, program Satu Data merupakan salah satu prioritas Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat yang dikemas dalam program Satu Data untuk Gerak Sinergi Membangun Negeri (SATURASI).

Program tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data pembangunan, mulai dari data perencanaan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), hingga data sektoral lainnya.

Menurut Wistha, keterpaduan data akan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi pemerintah daerah maupun pusat sekaligus meningkatkan efektivitas perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ia juga meminta seluruh OPD berkomitmen menyediakan serta memperbarui data sesuai standar yang ditetapkan agar setiap kebijakan pembangunan didukung informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Kepala Bapperida Aceh Barat, Abdul Wahab, menegaskan bahwa data memiliki peran strategis dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pengendalian, evaluasi hingga pengukuran kinerja daerah.

Karena itu, sinergi antara koordinator data, walidata, pembina data, dan seluruh produsen data menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan SATURASI.

Di sisi lain, Kepala Diskominsa Aceh Barat, Dedi Mulianda, menyatakan pihaknya akan memperkuat integrasi data melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan Portal SATURASI.

Sebagai walidata, Diskominsa bertanggung jawab mendorong penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, serta pemeriksaan data yang dihasilkan seluruh OPD.

Melalui portal tersebut, data pembangunan diharapkan terhimpun dalam satu platform yang dapat diakses sesuai kewenangan dan hak akses masing-masing pengguna.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Wagub Aceh Bersama Kapolda Jenguk Korban Insiden Bendera di Pidie

Oleh Redaksi · 5 Nov, 22.18 WIB



PIDIE – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, bersama Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan, menjenguk para korban insiden pengibaran dan penertiban bendera Bulan Bintang di Kabupaten Pidie, Kamis (5/11/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Wagub dan Kapolda turut didampingi Komandan Korem 011/Lilawangsa Kolonel Inf. Teuku Mustafa Kamal, Anggota DPRA Khairil Syahrial dari Fraksi Gerindra, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, Dirintelkam Polda Aceh, Kombes Pol Said Anna Fauza, Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, serta Karo Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat.

Kunjungan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan perhatian Pemerintah Aceh terhadap masyarakat yang menjadi korban dalam peristiwa di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Pada kesempatan itu, Fadhlullah bersama Kapolda Aceh menyempatkan diri berdialog langsung dengan para korban dan keluarga. Mereka mendengarkan berbagai keluh kesah, masukan, serta aspirasi masyarakat terkait peristiwa yang terjadi.

Wagub memberikan perhatian terhadap kondisi para korban dan keluarga yang terdampak. Dialog tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah dan unsur terkait untuk mendengar langsung kebutuhan serta harapan masyarakat.

Selain menjenguk dan memberikan dukungan moril, Fadhlullah juga menyerahkan bantuan kepada para korban sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para masyarakat yang menjadi korban.

Melalui kunjungan ini, Pemerintah Aceh berharap seluruh korban mendapatkan perhatian dan penanganan yang baik. Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi, menjaga ketenangan, serta tidak memperkeruh suasana.

Wagub bersama Kapolda dan unsur Forkopimda menegaskan pentingnya menjaga persatuan, keamanan, dan perdamaian Aceh agar situasi tetap kondusif serta hubungan antara masyarakat dan seluruh unsur pemerintahan tetap terjaga.[]

ACEH

DPMG Aceh Barat Nilai Tujuh Gampong Berprestasi 2026

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 20.17 WIB



Suasana koordinasi dan administrasi yang berlangsung khidmat di hadapan lambang negara.

MEULABOH– Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Barat melakukan penjaringan dan penilaian Gampong Berprestasi Tahun 2026 terhadap tujuh gampong. Kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong.

Kepala DPMG Aceh Barat, Drs. Marjan Hanafie Lubis, M.Si., mengatakan penilaian berlangsung pada 2–5 Oktober 2026 dengan melibatkan tujuh gampong dari sejumlah kecamatan.

Ketujuh gampong tersebut yakni Gunong Mata Ie (Panton Reu), Sawang Teubei (Kaway XVI), Ulee Blang (Bubon), Reusak (Samatiga), Kuta Padang (Johan Pahlawan), Pasi Pinang (Meureubo), dan Alue Batee (Arongan Lambalek).

"Penilaian berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, dengan tiga aspek utama, yakni pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan," kata Marjan, Kamis (5/11/26).

Menurutnya, penilaian tidak hanya mencakup kelengkapan administrasi, tetapi juga capaian program dan manfaatnya bagi masyarakat. Sejumlah indikator yang dinilai antara lain pelaksanaan kegiatan keagamaan, pembentukan Satgas Pageu Gampong, kebersihan lingkungan, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.

Tim penilai juga mengevaluasi keberhasilan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), pemberdayaan perempuan melalui PKK dan kelompok usaha bersama, pembinaan olahraga, penyelenggaraan majelis taklim, pemberian beasiswa bagi Aneuk Beut, serta program sosial seperti santunan kematian, rehabilitasi rumah dhuafa, dan layanan dokter bagi warga yang menderita sakit menahun.

Marjan menjelaskan, proses penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen administrasi, data capaian kinerja, serta bukti pendukung pelaksanaan program dan kegiatan gampong selama 2025 dan 2026.

Ia menegaskan, penilaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah gampong untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat inovasi, dan mengoptimalkan potensi daerah.

"Prestasi sebuah gampong tidak hanya diukur dari kelengkapan administrasi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah gampong menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan nyata," ujarnya.

Marjan berharap hasil penilaian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh gampong di Aceh Barat untuk meningkatkan kinerja, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menyelaraskan program pembangunan gampong dengan prioritas pemerintah kabupaten.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan terwujudnya pemerintahan gampong yang profesional, transparan, inovatif, dan responsif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

Satgas PRR Salurkan Puluhan Paket Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Barat

Oleh Aceh Barat · 5 Nov, 21.25 WIB



Brigjen Marinir Guslin bersama Tim Satgas PRR menyerahkan bantuan Kemensos RI secara simbolis kepada warga terdampak banjir di Desa Pasie Aceh Tunong,FOTO/ist

MEULABOH – Kepedulian terhadap masyarakat terdampak banjir terus ditunjukkan pemerintah melalui penyaluran bantuan kemanusiaan. Kali ini, puluhan paket bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI disalurkan kepada warga terdampak banjir di Desa Pasie Aceh Tunong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Kamis, (05/11/26).

Penyaluran bantuan tersebut dilakukan bersama Tim Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Bencana Aceh dan Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Brigadir Jenderal Marinir Guslin hadir mewakili Kepala Satgas PRR, didampingi Anggota Satgas Nasional Komisaris Besar Polisi Roy Huwae dan Gatot Satria Wijaya.

Puluhan paket bantuan yang disalurkan Kemensos RI tersebut terdiri atas kasur, family kit atau perlengkapan kebutuhan keluarga, selimut, serta tenda gulung.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Brigjen Marinir Guslin sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana banjir.

Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang tengah berupaya memulihkan kehidupan setelah bencana.

Melalui sinergi Satgas PRR dan Kementerian Sosial, pemerintah terus mendorong percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana, sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani aktivitas seperti sediakala.[]

Editor : Biro Meulaboh.

ACEH

BBPOM Aceh Perkuat Peran Kader Kesehatan Aceh Besar dalam Edukasi Keamanan Pangan

Oleh Redaksi · 5 Nov, 15.58 WIB



BANDA ACEH – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) terus memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan melalui edukasi kepada kader kesehatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kader Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar, Rabu (4/11/2026), dengan melibatkan Kader Promosi Kesehatan (Promkes) dan Kader Keamanan Pangan Desa di Aceh Besar.

Materi keamanan pangan disampaikan oleh Ketua Tim Publikasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi BBPOM Aceh, Suryani Fauzi.

Dalam pemaparannya, Suryani menegaskan bahwa keamanan pangan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pelaku usaha.

"Keamanan pangan itu bukan hanya tugas BPOM atau Dinas Kesehatan saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha," ujar Suryani.

Menurutnya, kader kesehatan memiliki posisi strategis sebagai fasilitator, edukator, sekaligus agent of change dalam menyebarluaskan informasi keamanan pangan. Kader diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran keluarga untuk memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan yang aman.

"Kami tidak mungkin mampu melakukan pengawasan sampai kepada penerima makanan yang terakhir. Karena itu, keterlibatan kader sangat penting untuk membantu menyampaikan edukasi dan mengawasi keamanan pangan di lingkungan masyarakat," jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan pengawasan pangan semakin beragam seiring perkembangan teknologi, perdagangan, dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan pangan yang beredar dan dikonsumsi tetap aman.

Dalam bimtek tersebut, peserta mendapatkan pemahaman mengenai tiga jenis bahaya yang dapat mencemari pangan, yaitu bahaya biologis, kimia, dan fisik. Kontaminasi dapat terjadi akibat lingkungan yang tidak higienis, penggunaan bahan berbahaya seperti boraks, maupun penanganan makanan yang tidak tepat.

Suryani menekankan pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan dalam setiap tahapan pengolahan hingga penyajian makanan. Praktik sederhana seperti mencuci tangan, menggunakan kemasan yang sesuai untuk pangan, serta memisahkan penanganan makanan dari uang saat berjualan perlu menjadi perhatian.

"Jangan sampai orang yang menjual makanan memegang uang, kemudian langsung memegang kue atau makanan lainnya. Kalau bisa, orang yang menangani makanan dibedakan dengan orang yang memegang uang," pesannya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Tragedi Penembakan di Tiro Pidie, KPA Luwa Nanggroe Desak Ketua DPRA Ambil Sikap Tegas

Oleh Redaksi · 5 Nov, 14.18 WIB



BANDA ACEH — Bungkamnya para wakil rakyat di tengah pertumpahan darah warga sipil di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, memantik perlawanan keras dari internal pejuang Aceh.

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe sekaligus Penasihat Khusus Gubernur Aceh, T. Emi Syamsyumi yang akrab disapa Abu Salam melempar tuduhan tajam terhadap jajaran legislatif, dari tingkat daerah hingga Senayan.

Abu Salam menyoroti kejanggalan di balik heningnya para politikus pasca-insiden represif aparat keamanan saat peringatan Maulid Nabi, yang dipicu persoalan pengibaran bendera Bulan Bintang, Rabu (4/11/2026).

Tragedi berdarah itu merenggut nyawa Abzalul Rizal (20), warga Dayah Gampong Baro, akibat luka tembak, serta melukai enam warga sipil lainnya.

"Gubernur Aceh sudah bergerak pasang badan dan berupaya maksimal di garis depan perkara ini. Tapi kenapa lembaga legislatif—mulai dari DPRA, DPR RI, hingga DPD RI perwakilan Aceh—malah memilih bungkam? Jika mereka memilih diam menyaksikan rakyatnya ditembaki dan dianiaya, timbul pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang sedang bermain sandiwara di atas penderitaan rakyat Aceh?" ujar Abu Salam dengan nada gusar.

Secara khusus, Abu Salam mengarahkan telunjuknya kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli alias Abang Samalanga.

Sebagai pimpinan tertinggi parlemen Aceh, Abang Samalanga dan seluruh anggota DPRA dinilai telah kehilangan keberanian institusional untuk membela konsistensi kehendak politik rakyat yang diwakilinya.

"Tanggung jawab utama hari ini ada di tangan legislatif. Lembaga DPRA bukan sekadar penonton bentrokan. Abang Samalanga harus ambil sikap tegas, jangan mengorbankan martabat Aceh demi kalkulasi politik aman," kata Abu Salam.

"Jika wakil rakyat di DPRA, DPR RI, dan DPD RI asal Aceh lepas tangan dari tindakan represif Aparat Penegak Hukum (APH), maka legitimasi keberadaan mereka di kursi parlemen layak dipertanyakan," lanjutnya.

Kritik tersebut kian beralasan mengingat jatuhnya korban luka-luka yang menyasar warga tak berdosa yakni Basri Hasan (46) warga Dayah Cot, Muhammad (48) dan Musliadi (40) warga Pulo Keunari, Darul Kamal (52) warga Paya Cot, Juanda Cut Rahman (62) warga Meunasah Mancang, dan Mutia (38) warga Gampong Pulo Keunari.

Kasus Mutia mempertegas kebrutalan di lapangan. Menurut keterangan suaminya, Iskandar, Mutia dihantam kekerasan fisik oleh oknum aparat saat sedang berjalan pulang usai berbelanja di lokasi yang berjarak lebih dari 100 meter dari titik utama …

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ACEH

Mualem-Dek Fadh Berduka atas Meninggalnya Warga Pidie dalam Insiden Pengibaran Bendera

Oleh Redaksi · 5 Nov, 13.50 WIB



BANDA ACEH — Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tragis yang terjadi saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie.

Peristiwa yang dipicu oleh pengibaran Bendera Bintang Bulan tersebut berujung pada jatuhnya korban jiwa. Seorang warga setempat dilaporkan meninggal dunia pada Rabu (4/11/2026) sore setelah terkena tembakan dalam ketegangan yang terjadi di lokasi.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan Mualem dan Dek Fadh menginginkan persoalan ini ditangani dengan baik.

"Tentu penanganan secara hukum. Ada korban jiwa dari masyarakat sipil, ada korban yang terluka juga dari masyarakat sipil," kata Nurlis di Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, prinsip utama dalam penanganan insiden tersebut adalah menjaga perdamaian sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan seadil-adilnya.

"Prinsip utamanya adalah tetap dalam koridor perdamaian, dan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai melukai hati rakyat," ujar Nurlis.

Nurlis menjelaskan, Mualem telah mengetahui peristiwa tersebut dan menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam. Hal serupa juga disampaikan Dek Fadh yang menerima kabar insiden itu saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Banda Aceh.

"Saya sangat sedih dan prihatin saat mendengar kejadian ini. Atas nama keluarga dan Pemerintah Aceh, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam peristiwa di Pidie," kata Dek Fadh dalam keterangannya di Kamis.

"Kita tentu sangat berduka. Tidak ada keluarga yang ingin kehilangan orang yang dicintainya, terlebih dalam suasana yang seharusnya dipenuhi kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan," lanjutnya.

Menyikapi kejadian tersebut, Dek Fadh mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian bersama.

"Yang paling utama adalah keselamatan rakyat. Kita tidak ingin ada lagi masyarakat yang terluka, apalagi kehilangan nyawa. Saya berharap seluruh pihak dapat menahan diri, mengedepankan dialog, dan tidak membiarkan persoalan ini berkembang menjadi konflik yang lebih besar," ucap dia.

Ia kembali menegaskan bahwa pentingnya menyelesaikan polemik terkait bendera ini secara bermartabat dan kepala dingin, tanpa harus mengorbankan nyawa warga sipil.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ANEKA BERITA

7 BERITA

SPORT

Cristiano Ronaldo Resmi Gantung Sepatu di Timnas Portugal

Oleh Van · 5 Nov, 22.50 WIB



Gairah dan dedikasi luar biasa dari Cristiano Ronaldo saat membela tim nasional. Sang kapten menunjukkan semangat pantang menyerah di setiap pertandingan.

JAKARTA – Dunia sepak bola mendapat kabar besar. Cristiano Ronaldo akhirnya memutuskan mengakhiri perjalanan panjangnya bersama tim nasional Portugal setelah lebih dari dua dekade menjadi ikon sekaligus mesin gol utama Selecao das Quinas.

Megabintang berjuluk CR7 itu mengumumkan keputusan pensiun dari tim nasional pada Kamis, 5 November 2026. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sebuah video yang diunggah ke akun media sosial pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Ronaldo menyampaikan pesan emosional mengenai perpisahannya dengan seragam kebanggaan Portugal. Ia menegaskan bahwa negaranya akan selalu menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya.

Keputusan ini sekaligus menandai berakhirnya pengabdian internasional seorang pemain yang selama lebih dari 23 tahun telah membangun sejarah, memecahkan berbagai rekor, dan mengantarkan Portugal meraih sejumlah prestasi bergengsi.

Dalam video perpisahannya, Ronaldo tampil mengenakan kemeja putih sambil memegang selembar pesan yang berisi ungkapan perpisahan kepada tim nasional. Ia menyebut sudah waktunya menyerahkan jersey bernomor punggung tujuh kepada generasi pemain berikutnya.

Ronaldo mengungkapkan bahwa selama 23 tahun mengenakan seragam tersebut, dirinya tidak pernah menganggap nomor tujuh sebagai milik pribadi. Baginya, mengenakan dan membela Portugal merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang telah membawanya tampil di berbagai stadion dunia.

Ia juga mengakui bahwa keputusan meninggalkan tim nasional bukan perkara sederhana. Menurutnya, ada keputusan besar dalam kehidupan yang tidak cukup ditentukan melalui pertimbangan rasional, tetapi juga harus melibatkan perasaan.

Perjalanan Ronaldo bersama Portugal dimulai pada Agustus 2003 ketika usianya baru menginjak 18 tahun. Di bawah arahan pelatih Luiz Felipe Scolari, ia menjalani debut internasional dalam pertandingan menghadapi Kazakhstan pada 20 Agustus 2003.

Selama membela negaranya hingga penampilan terakhir yang tercatat pada September 2026, Ronaldo mengoleksi 234 pertandingan internasional. Catatan tersebut menempatkannya sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah sepak bola tim nasional putra.

Produktivitasnya juga sulit ditandingi. Dari 234 pertandingan, Ronaldo membukukan 146 gol dan 45 assist. Kedua pencapaian tersebut menjadi rekor tersendiri dalam sejarah tim nasional Portugal, sekaligus mempertegas statusnya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sepak bola internasional.

Kontribusi Ronaldo tidak berhenti pada torehan individu. Ia turut menjadi bagian penting keberhasilan Portugal menjuarai Piala Eropa 2016 serta meraih gelar UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

EKONOMI

BEI Dorong Peningkatan Literasi Investasi melalui CMSE 2026

Oleh Hamdani · 5 Nov, 18.11 WIB



Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menyampaikan sambutan pada pembukaan Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis

JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kembali menggelar Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2026 pada 5–7 November 2026 di Main Hall BEI, Jakarta.

Mengusung tema "Satu Langkah Investasi, Berjuta Peluang Masa Depan", kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan, sekaligus mendorong masyarakat mengenal pasar modal serta memulai investasi secara bijak, terencana, dan sesuai profil risiko.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, peningkatan jumlah investor pasar modal perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai instrumen investasi, tujuan keuangan, serta risiko yang menyertainya.

Menurutnya, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat seseorang memulai, tetapi juga membutuhkan persiapan, perencanaan, dan konsistensi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

"Seperti marathon, investasi bukan sekadar tentang seberapa cepat kita memulai atau seberapa jauh kita ingin melangkah, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, menjaga ritme, dan tetap konsisten untuk mencapai tujuan," ujar Jeffrey dalam sambutannya pada pembukaan CMSE 2026, Kamis (5/11).

Ia menambahkan, setiap orang memiliki titik awal, kemampuan, dan tujuan keuangan yang berbeda. Karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai pilihan instrumen investasi dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta profil risiko masing-masing.

Pesan tersebut sejalan dengan kampanye #AkuInvestorSaham yang diluncurkan BEI sejak 10 Agustus 2023. Kampanye ini mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengenal pasar modal dan berpartisipasi dalam investasi sesuai kemampuan serta kebutuhan keuangan.

CMSE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan edukasi melalui seminar, talk show, dan pameran produk serta layanan pasar modal. Pada hari pertama, agenda meliputi Opening Ceremony, Galeri Investasi BEI Award 2026, serta seminar utama bertajuk "Indonesia's Economic & Investment Outlook".

Selanjutnya, pada Jumat (6/11), pengunjung dapat mengikuti peluncuran Indonesia ESG Bond Index oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), serta berbagai sesi edukasi mengenai perencanaan keuangan, instrumen investasi, dan pasar modal syariah.

Sementara pada Sabtu (7/11), kegiatan akan diisi dengan edukasi Exchange-Traded Fund (ETF) Emas, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam sektor keuangan, serta sesi inspiratif bersama figur publik dan atlet.

Selain kegiatan edukasi, CMSE 2026 juga menghadirkan 88 booth dengan lebih dari 100 tenant.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

LINGKUNGAN

Jelang Peringatan 100 Tahun Panas Bumi Indonesia, PGE Percepat Pengembangan Menuju Kapasitas 1 GW

Oleh Van · 5 Nov, 17.12 WIB



Pemaparan mendalam mengenai kinerja dan lintasan fundamental Pertamina Geothermal Energy di tengah dinamika pasar.

JAKARTA — 5 November 2026 — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) terus memperkuat perannya dalam perjalanan panjang pengembangan panas bumi Indonesia yang memasuki usia satu abad. Berawal dari penemuan potensi panas bumi pada 1926 di Kamojang, Jawa Barat, wilayah ini kini berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan energi panas bumi nasional.

Momentum satu abad ini turut dimaknai Direktur Utama PGE Ahmad Yani. Menurutnya, komitmen terhadap energi bersih dan kinerja bisnis yang solid dapat berjalan beriringan.

"Tujuan kami adalah untuk melayani masyarakat, baik dengan menyediakan pasokan listrik berbasis energi panas bumi yang tersedia setiap saat maupun Beyond Electricity. Sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transisi energi dan ketahanan energi nasional, ekspansi bisnis yang kami lakukan difokuskan untuk memberikan manfaat panas bumi sebesar-besarnya. Oleh karena itu, kinerja positif ini menjadi bekal bagi kami untuk melayani masyarakat," jelas Ahmad Yani.

Sejalan dengan fokus ekspansi tersebut, PGE kini mengelola kapasitas terpasang secara mandiri (own operation) sebesar 727 megawatt (MW). Kapasitas ini ditargetkan naik menjadi 1 gigawatt (GW) pada 2028 dan 1,8 GW pada 2033 melalui pengembangan organik, anorganik, dan akselerasi proyek. Untuk itu, PGE mengoptimalkan aset eksisting, memperluas kapasitas, dan mengembangkan sumber pendapatan baru.

Langkah menuju target tersebut didukung kinerja positif PGE sepanjang kuartal III-2026. Mengacu pada laporan keuangan per 30 September 2026, laba bersih Perseroan tumbuh 21,45 persen secara year-on-year (YoY), melampaui pertumbuhan pendapatan yang naik 10,46 persen YoY.

Direktur Keuangan PGE Fransetya Hasudungan Hutabarat mengatakan, capaian ini mencerminkan konsistensi strategi bisnis Perseroan yang efektif dan efisien.

"Proyek panas bumi PGE adalah proyek jangka panjang yang berjalan multi-years. Karena itu, pertumbuhan tidak hanya diukur dari penambahan kapasitas, tetapi juga dari kemampuan Perseroan menjaga profitabilitas dan kesehatan keuangan di setiap tahap pengembangan. Dengan prinsip growth with discipline, kami memastikan pertumbuhan tersebut berkualitas, menguntungkan, dan berkelanjutan. Harapannya, investasi yang kami tanam hari ini dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian dan masyarakat," ujar Fransetya.

Pertumbuhan tersebut tercermin dalam kinerja PGE sepanjang Januari hingga September 2026: Pendapatan : US$352,20 juta, naik 10,46 persen YoY. Laba bersih : US$126,62 juta, naik 21,45 persen YoY. EBITDA : US$287,77 juta, naik 15,58 persen YoY.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

HIBURAN

Kiky Saputri Minta Maaf Usai Dirujak Warganet

Oleh Redaksi · 5 Nov, 06.50 WIB



BANDA ACEH -Komika Kiky Saputri akhirnya meminta maaf usai dirujak warganet setelah video lawas dirinya menyebut istilah "rakyat jelata" viral di media sosial.

Kiky menyebut rakyat jelata saat menumpang pesawat jet pribadi bersama sejumlah tokoh nasional.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu 4 November 2026, Kiky menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang merasa tersinggung dengan ucapannya tersebut.

Ia juga memberikan penjelasan mengenai konteks video yang sebenarnya direkam pada 2023. Kiky menjelaskan, saat itu dirinya bersama beberapa pengisi acara mendapat undangan untuk menghadiri peresmian Bandara Internasional Kertajati.

Dalam perjalanan menuju lokasi, mereka berada dalam satu pesawat bersama Menteri Perhubungan saat itu, Budi Karya Sumadi.

Dalam video yang kembali menjadi perbincangan tersebut, Kiky terlihat bersama sejumlah figur publik, termasuk Armand Maulana dan Gilang Dirga.

Sebagai komika yang dikenal dengan materi roasting, Kiky mengaku terbiasa menggunakan candaan, sindiran, hingga sarkasme dalam merespons berbagai situasi. Ia menyebut istilah "rakyat jelata" dalam video itu bukan dimaksudkan untuk merendahkan masyarakat.

"Aku memang sering menggunakan candaan, sindiran, dan sarkasme untuk menanggapi berbagai situasi," tulis Kiky dalam penjelasannya.

Kiky menegaskan, penggunaan istilah tersebut justru merupakan sindiran terhadap fenomena flexing yang ramai diperbincangkan saat itu.

Ia juga merasa dirinya termasuk bagian dari masyarakat biasa yang baru pertama kali merasakan pengalaman menaiki jet pribadi.

"Karena aku pun memposisikan diri sebagai 'rakyat jelata' yang baru pertama kali naik private jet," kata Kiky.

Meski demikian, Kiky menyadari bahwa maksud sebuah candaan tidak selalu diterima dengan pemahaman yang sama oleh orang lain.

Kiky mengakui ada pilihan kata dalam video tersebut yang mungkin terdengar kurang tepat. Terlebih, sebagai figur publik yang memiliki ruang untuk didengar banyak orang, dirinya merasa perlu lebih berhati-hati dalam berbicara.

"Aku punya tanggung jawab untuk lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata," kata Kiky.

EKONOMI

Reposisi Hubungan Ekonomi Filipina-Tiongkok Kehati-hatian Strategis di Tengah Ketergantungan Asimetris

Oleh Redaksi · 5 Nov, 15.15 WIB



Sebanyak 22 organisasi bisnis dan industri Filipina belum lama ini menyerukan bersama agar Manila menurunkan ketegangan hubungan dengan Tiongkok. Di balik seruan itu bukanlah gestur diplomatik, melainkan sederet data yang, jika dibuka sektor demi sektor, sulit dihindari. Dari lini produksi pabrik hingga panel surya di atap rumah, dan dari jalur pengepakan pisang hingga dermaga ekspor, banyak simpul kunci ekonomi Filipina tertanam dalam rantai pasok atau pasar Tiongkok.Industri elektronik adalah tulang punggung ekspor Filipina. Pada 2025, nilai ekspor produk elektronik Filipina mencapai 49,64 miliar dolar AS, lebih dari 60 persen total ekspor barang, dan terkait langsung dengan sekitar 3 juta lapangan kerja. Pemerintah Marcos menargetkan ekspor chip dan elektronik berlipat ganda menjadi 110 miliar dolar AS pada 2030, yang berarti laju pertumbuhan majemuk tahunan perlu melebihi 17 persen. Namun jalur peningkatan ini tidak dapat menghindari Tiongkok: industri semikonduktor dan elektronik Filipina sangat bergantung pada impor wafer silikon, komponen elektronik, dan bahan produksi dari Tiongkok. Pada Juni 2026, produk elektronik menyumbang 34,8 persen total impor Filipina, impor semikonduktor naik dua kali lipat secara tahunan, dan impor bahan manufaktur elektronik melonjak 227,9 persen; pada Agustus, impor elektronik mencapai 4,51 miliar dolar AS, atau 34,8 persen impor bulan itu. Impor peralatan listrik dan elektronik Filipina dari Tiongkok pada 2025 melebihi 11 miliar dolar AS, sementara mesin dan peralatan mekanik melebihi 4 miliar dolar AS. Tanpa input dari Tiongkok, persoalan pabrik elektronik di Luzon bukanlah “penurunan daya saing”, melainkan kemungkinan lini produksi berhenti pada sore hari yang sama.

Filipina adalah salah satu negara dengan tarif listrik tertinggi di Asia Tenggara, dan panel surya atap cepat menyebar di kalangan rumah tangga dan pengguna komersial. Pada 2025, Filipina mengimpor panel surya senilai 483 juta dolar AS, dengan 98 persen berasal dari Tiongkok; kapasitas impor naik dari 3,1 GW pada 2024 menjadi 5,1 GW, atau tumbuh 62 persen. Pada empat bulan pertama 2026, Tiongkok mengekspor 4,133 GW komponen fotovoltaik ke Filipina, rekor tertinggi, dan Filipina telah menggantikan Pakistan sebagai pasar ekspor panel surya Tiongkok terbesar kedua.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

ISLAM

Hutan Bukan Milik Oligarki!

Oleh Haziqah Regar · 5 Nov, 12.28 WIB



Foto ini menampilkan massa pengunjuk rasa yang memegang spanduk besar bertuliskan seruan untuk melindungi hutan dan mengadili perusaknya di depan Monumen Nasional. Para

PANDUK bertuliskan "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili" dibentangkan oleh massa aksi di hadapan aparat pada hari Rabu (28/10) di depan gedung UOB Jakarta.

Spanduk tersebut dibentangkan saat massa berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), tetapi terhalang blokade aparat gabungan dari kepolisian dan TNI.

Massa aksi ini gabungan dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut lima tuntutan di antaranya.

Mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas peristiwa karhutla agar penanganan lebih maksimal.

Serta mengadili korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan untuk mencegah konflik agraria, tumpang tindih perizinan dan ekploitasi sumber daya alam.

Fakta Penguasaan Hutan oleh Oligarki

Data Terbaru 2025-2026 fakta penguasan hutan oleh oligarki:

• Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2025 mencatat 26,8 juta hektare lahan dimonopoli konglomerat, setara 40% luas hutan produksi Indonesia yang dikuasi 60 keluarga.

• 9 juta hektare dikuasai 7 entitas raksasa: Sinar Mas Group 4,4 juta ha, Royal Golden Eagle (Sukanto Tanoto) 2,6 juta ha, Korindo 919 ribu ha, dan lainnya. Luasnya setara 5 kali Pulau Bali.

• 79 juta hektare diberikan di era Soeharto (32 tahun) dan 55 juta hektare di era SBY hanya dalam 10 tahun. Inilah akar kerusakan struktural.

• Deforestasi legal sepanjang 2025, deforestasi mencapai 433.751 ha (naik 66%), dan 58% di antaranya adalah LEGAL karena terjadi di dalam konsesi korporasi.

Akhirnya pemerintah mengakui pada 20 Januari 2026, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mencabut 28 izin korporasi di Sumatera, termasuk PT. Toba Pulp Lestari dan anak usaha APRIL Group, karena penyalahgunaan kawasan hutan. Satgas mengklaim telah menertibkan 4,09 juta hektare.

Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh oligarki telah membawa kerusakan lingkungan yang besar dan menyengsarakan rakyat.

Dampak kerusakan itu bencana ekologis efek dari pembukaan hutan dan aktivitas ekstraktif.

Memicu bencana lingkungan seperti banjir bandang, tanah longsor, krisis air bersih, serta kabut asap akibat karhutla.

Selain itu, juga memperparah krisis iklim global dengan alih fungsi hutan secara masif.

Tidak hanya itu masyarakat adat atau warga lokal juga menghadapi tekanan dan kriminalisasi yang mencoba mempertahankan lingkungan dan hutan mereka dari korporasi dan oligarki.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

OPINI

Mengenal Listyo Sigit, Eks Kapolri yang Jadi Raja Oknum

Oleh Redaksi · 5 Nov, 09.22 WIB



0leh:Rosadi Jamani

KITA lanjutkan aksi Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menghancurkan nama Polri. Setiap kali polisi melakukan kejahatan, itu pasti oknum. Tapi, oknum kok sekecamatan.

Lalu, siapa raja oknum itu? Dialah Listyo Sigit Prabowo, eks Kapolri. Nasib jenderal bintang empat ini sangat tragis, berakhir di penjara. Mari kita kenalan lebih dekat dengan si penyadap Presiden ini.

Mari kita berkenalan dengan Listyo Sigit Prabowo, sosok yang kariernya melesat dari Ambon hingga kursi Kapolri, dari lulusan Akpol 1991 menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara, bahkan mencatat masa jabatan sekitar 5 tahun 8 bulan, menjadikannya Kapolri terlama di era Reformasi.

Kalau karier birokrasi itu permainan ular tangga, beliau ini seperti pemain tiap lempar dadu selalu dapat angka enam.

Dari Kapolres Pati, Wakapolrestabes Semarang, Kapolresta Surakarta, ajudan Presiden Jokowi, Kapolda Banten, Kadiv Propam, Kabareskrim, hingga akhirnya duduk di singgasana Kapolri.

Bahkan beliau membawa slogan PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Bunyinya begitu gagah, sampai terdengar seperti nama robot supercanggih bisa mendeteksi maling sandal dari orbit Saturnus.

Saat itu, langit seolah membuka karpet merah. Burung-burung bernyanyi. Awan membentuk tanda hormat. Pohon kelapa bergoyang sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Pendukung memuji. Penggemar bertepuk tangan. Pengkritik pun kehabisan stok bensin. Semuanya tampak megah. Semuanya tampak sempurna.

Tapi, Indonesia punya satu makhluk legendaris lebih terkenal dari naga, Godzilla, dan tuyul digabung jadi satu. Namanya, Oknum.

Ajaibnya, setiap ada polisi berprestasi, itu institusi. Begitu ada bikin ulah, itu oknum. Satu orang oknum. Dua orang oknum. Sepuluh orang oknum. Seratus orang masih oknum. Kadang rakyat sampai bingung, ini oknum sebenarnya manusia atau spesies langka berkembang biak lebih cepat dari ikan lele.

Akhirnya muncul pertanyaan rakyat jelata sedang menyeruput kopi sasetan sambil memandangi tagihan listrik, kalau oknum ada di mana-mana, siapa rajanya? Listyo Sigit Prabowo, jenderal bintang empat. Bersama para jenderal lainnya, menyadap telepon orang terkuat di negeri ini.

Kini si raja oknum itu, sejak 3 November 2026 dijebloskan ke penjara, bersama dua anak buahnya yang juga jenderal. Sudah berapa banyak penjahat yang dijebloskan mereka ke penjara. Sekarang, justru mereka menikmati indahnya suasana hotel prodeo. Sayangnya, apakah benar fisiknya di penjara?

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

Pindai QR untuk membaca berita ini di web

REDAKSI

PENERBIT: PT. Harian Aceh Indonesia
PEMIMPIN REDAKSI: Muhammad Saman
REDAKTUR PELAKSANA: Adam
REDAKTUR: Hayat
SEKRETARIS REDAKSI: Ola

Jurnalis
Banda Aceh:
1. IRWAN SAPUTRA - NOMOR 12334-PWI/WDa/DP/XII/2017/01/01/912.
2. Hamdani

Bireuen:
1. M. Ilham Sakubat

Lhokseumawe:
1. Yoppi

Aceh Barat:
1. Kurniawan

Jawa Timur:
1. Rut Sriwahyuni

Fotografer:
1. Mishabul Amin
2. Nazaruddin

Social Media Manager:
1. Syukur M. Amin